



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA

ديوان فروع رليات كبو فتن اچيه تغكارا

Jln. Jend. Ahmad Yani No. Telp. (0629) 522892, 21015, Fax.(0629) – 21015
Kutacane – Aceh Tenggara 24651

= N O T U L E N =

1. Acara

: RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG III TAHUN 2026 TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027, DAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026, PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029 DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029.
- 1 Hari/Tanggal

: KAMIS, 27 AGUSTUS 2026
2. Jam

: 09..00 – 16.45. Wib.
3. Tempat

: RUANG RAPAT UTAMA DPRK ACEH TENGGARA
4. PimpinanRapat

: KETUA DPRK ACEH TENGGARA (**Dr. DENNY FEBRIAN ROZAS.STP,M.Si**)
5. Sekretaris

: SEKRETARIS DPRK ACEH TENGGRA (**MUHAMMAD HATTA, SE**)
6. Notulen

: HADI FATHUR RAHMI, se
7. Anggota DPRK Yang Hadir Sesuai Undangan

:

1. DENNY FEBRIAM ROZA, S.STP, M.Si

2. GEGOH MUSTAWA MADYA

3. H. BUKHARI

4. ARNOLD, SH

5. ANUGRAH RIZKY PUTRA, ST

6. ROY HENDRA PURNOMO, SE

7. M. RAFI SEKEDANG

8. SAMSUARIADI, ST

9. MARSIDIN SITEPU

10. SATRIA ABADI

11. M. MUFTY DESKY

12. H. MARWAN HUSNI, S.Sos.I

13. ALIYAS

14. MARAWAL HAKIM

15. ABI HASAN, SH

16. MUHARRI KASTURI

17. PUTRI NIKEN JILE

18. INTAN PERMATA SARI

19. MUSLIADI

20. MIRZA AL MAHBUBI, S.T., M.T

21. H. BUSTAMI RAMUD

22. TIMBUL HASUDUNGAN S

23. MANUMPAK

24. GERLAM

25. KAMIRUN MUNTHE
8. Izin/Sesuai dengan Undangan

:

1. DIAN REZA PAHLEVI, SH

2. SAHIDIN BASRI, SKM, M.Kes

3. MUSYADI

4. MARUAN HANAFI

5. RONAL HALOMOAN, S.H
9. Turut Hadir

: ASISTEN II, UNSUR FORKOPIMDA, SEKDAKAB, DINAS JAWATAN, KABAG DAN PARA UNDANGAN LAINNYA. (DAFTAR HADIR TERLAMPIR).

- P E M B U K A A N -

1. LAPORAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA OLEH SEKRETARIS DPRK, DARI 30 (TIGA PULUH) ORANG ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA YANG HADIR 25 (DUA PULUH LIMA) ORANG, IZIN 5 (LIMA) ORANG SESUAI DENGAN TATA TERTIB MAKA JUMLAH YANG HADIR TELAH MEMENUHI QOURUM UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA (DAFTAR HADIR TERLAMPIR) -----

2. SELANJUTNYA UNTUK MENDAPATKAN BERKAH DAN HIDAYAH DARI ALLAH SWT. MARILAH SEJENAK KITA MENDENGARKAN PEMBACAAN AYAT SUCI AL-QUR'AN YANG DIBACAKAN OLEH USTADZ. (**MULIA ARDI, S.PdI**). -----

3. SELANJUTNYA MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA YANG DIPANDU OLEH PETUGAS (**HADIRIN DIMOHON BERDIRI**) -----

4. PIDATO SAMBUTAN KETUA DPRK ACEH TENGGARA DALAM ACARA PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG III TAHUN 2026 TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026, PENANDA TANGAN NOTA KESEPAKATAN RANCANGAN KUA-PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027, PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026, PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2027 DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029.

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN.!

- ❖ YTH. SAUDARA BUPATI & WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA;
- ❖ YTH. SAUDARA DANDIM 0108 ACEH TENGGARA;
- ❖ YTH. SAUDARA KAPOLRES ACEH TENGGARA;
- ❖ YTH. SAUDARI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA;
- ❖ YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE
- ❖ YTH. SAUDARA KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TENGGARA;
- ❖ **YTH. SAUDARA SEKDAKAB, PARA ASISTEN DAN SELURUH KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN;**
- ❖ YTH. SAUDARA PARA WAKIL KETUA DPRK BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN;
- ❖ YTH. PARA PIMPINAN LEMBAGA FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN, TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, POLITIK, PEMUDA, ORMAS, LSM DAN UNSUR PERS;
- ❖ YTH. HADIRIN HADIRAT SEKALIAN PARA UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN;

PUJI DAN SYUKUR MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA, KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI **PEMBUKAAN** RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA DALAM RANGKA PEMBAHASAN **RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025.**

SHALAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA, PARA SAHABAT DAN SELURUH PENGIKUT BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

RAPAT PARIPURNA YANG KITA LAKSANAKAN PADA HARI INI MERUPAKAN BAGIAN PENTING DARI RANGKAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, KHUSUSNYA DALAM MEWUJUDKAN **TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK BUKAN SEKADAR MEMENUHI KEWAJIBAN ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. LEBIH DARI ITU, PERTANGGUNGJAWABAN APBK MERUPAKAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT ATAS BAGAIMANA SELURUH SUMBER DAYA DAN ANGGARAN DAERAH TELAH DIRENCANAKAN, DILAKSANAKAN, SERTA DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA.

OLEH KARENA ITU, DPRK ACEH TENGGARA MEMANDANG BAHWA PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025 HARUS DILAKSANAKAN SECARA **OBJEKTIF, TRANSPARAN, KRITIS, DAN KONSTRUKTIF**, DENGAN TETAP MENGEDEPAHKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SERTA KEMAJUAN DAERAH.

KAMI BERHARAP MELALUI PEMBAHASAN BERSAMA ANTARA DPRK DAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NANTINYA DAPAT DIPEROLEH GAMBARAN YANG UTUH MENGENAI CAPAIAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025, BAIK DARI SISI PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, MAUPUN CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

KITA MENYADARI BAHWA DALAM PELAKSANAAN APBK MASIH TERDAPAT BERBAGAI TANTANGAN DAN KETERBATASAN. UNTUK ITU, EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN HARUS KITA JADIKAN SEBAGAI BAHAN PERBAIKAN UNTUK PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA.

SETIAP KEKURANGAN, MAUPUN KENDALA YANG MUNCUL HENDAKNYA TIDAK HANYA MENJADI BAHAN EVALUASI, TETAPI HARUS MENJADI DASAR UNTUK MELAKUKAN PEMBENAHAN AGAR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DAERAH SEMAKIN BAIK.

HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN,

KAMI MENGAJAK SELURUH PIHAK UNTUK MENJADIKAN PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN INI SEBAGAI MOMENTUM MEMPERKUAT **SINERGI DAN KEMITRAAN ANTARA DPRK DAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**. PERBEDAAN PANDANGAN DALAM PROSES PEMBAHASAN MERUPAKAN HAL YANG WAJAR DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI. NAMUN, SELURUH PERBEDAAN TERSEBUT HENDAKNYA DAPAT KITA KELOLA MELALUI KOMUNIKASI DAN MUSYAWARAH YANG BAIK, SEHINGGA MENGHASILKAN KEBIJAKAN YANG BENAR-BENAR BERPIHAK KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT.

KAMI BERHARAP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DAPAT MEMBERIKAN PENJELASAN YANG DIPERLUKAN SECARA TERBUKA DALAM PROSES PEMBAHASAN, SEHINGGA DPRK DAPAT MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN MASYARAKAT PADA AKHIRNYA DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT YANG LEBIH BESAR DARI SETIAP RUPIAH ANGGARAN YANG DIBELANJAKAN.

HADIRIN PESERTA SIDANG YANG BERBAHAGIA,

KEPADA SELURUH ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA, KAMI JUGA MENGHARAPKAN AGAR PEMBAHASAN DAPAT DILAKUKAN SECARA SUNGGUH-SUNGGUH, DENGAN TETAP MENJAGA OBJEKTIVITAS, INTEGRITAS, DAN KOMITMEN TERHADAP KEPENTINGAN MASYARAKAT.

PADA KESEMPATAN INI, ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA, KAMI MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA BUPATI ACEH TENGGARA BESERTA SELURUH JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG TELAH MENYAMPAIKAN RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

KAMI BERHARAP PROSES PEMBAHASAN HINGGA PENETAPAN RANCANGAN QANUN INI DAPAT BERJALAN DENGAN LANCAR, TERTIB, DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SEMOGA HASIL PEMBAHASAN NANTINYA DAPAT MENJADI BAGIAN DARI UPAYA MEMPERBAIKI KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN, MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN, SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.

DEMIKIAN SAMBUTAN INI KAMI SAMPAIKAN, TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN. MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

BILLAH **TAUFIQ** **WAL** **HIDAYAH**
WASALAMU **'ALAIKUM** **WR.** **WB**

5. UNTUK SELANJUTNYA PEMBACAAN PIDATO SAMBUTAN BUPATI ACEH TENGGARA, KEPADA SAUDARA BUPATI KAMI PERSILAKAN DENGAN SEGALA HORMAT.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN!

- YTH. SDR. KETUA DPRK ACEH TENGGARA,**
YTH. SDR. PARA UNSUR FORKOMPIMDA ACEH TENGGARA;
YTH. SDR. PARA WAKIL KETUA, PARA KETUA FRAKSI DAN PARA KETUA KOMISI SERTA SELURUH
ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA;
YTH. SDR. SEKDA, PARA ASISTEN, DAN STAF AHLI;
YTH. SDR/SDRI. PARA KEPALA OPD, PARA KABAG. DAN CAMAT;
YTH. SDR-SDRI. PARA UNSUR TOKOH MASYARAKAT, CERDIK PANDAI, TOKOH PEMUDA, PIMPINAN
PARTAI POLITIK DAN PIMPINAN ORMAS, SERTA REKAN-REKAN DARI UNSUR LSM DAN PERS;
YTH. TAMU UNDANGAN, SERTA HADIRIN HADIRAT SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA, TUHAN YANG MAHA ESA KARENA ATAS SEGALA RAHMAT, KARUNIA DAN HIDAYAH-NYA PADA HARI INI KITA SEMUA DAPAT MENGHADIRI PEMBUKAAN SIDANG PARIPURNA DPRK MASA SIDANG III (KE TIGA) TAHUN 2026 DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 DAN KUA PPAS PERUBAHAN TAHUN 2026 SERTA KUA PPAS MURNI TAHUN ANGGARAN 2027.

SELANJUTNYA YANG SEAQIDAH DENGAN KAMI, MARI KITA UCAPKAN SHALAWAT BERIRING SALAM KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA, PARA SAHABAT DAN PENGIKUTNYA.

BEBERAPA WAKTU YANG LALU, KITA DIHADAPKAN DENGAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI YANG MELANDA ACEH KHUSUSNYA KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG TELAH MEMBERIKAN PELAJARAN BESAR BAGI KITA. KERUGIAN TIDAK HANYA MATERI TAPI JUGA LUKA BAGI MASYARAKAT. SAAT INI KITA MASUK PADA TAHAP REHABILITASI DAN REKONTRUKSI DENGAN MELAKUKAN PERBAIKAN DAN BANTUAN RUMAH RUSAK BERAT, SEDANG DAN RINGAN, MELAKUKAN NORMALISASI SUNGAI DAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT TERDAMPAK.

PEMERINTAH DAERAH JUGA TELAH MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHAN BENCANA, JALAN, JEMBATAN, TANGGUL SERTA PENATAAN RUANG DENGAN TIDAK ADA LAGI IZIN BANGUNAN PEMUKIMAN PENDUDUK DI BANTARAN SUNGAI MAUPUN LERENG RAWAN LONGSOR. PEMULIHAN INFRASTRUKTUR JARINGAN AIR BERSIH YANG RUSAK AKAN SEGERA DIPERBAIKI AGAR MASYARAKAT MENDAPATKAN AKSES AIR BERSIH.

DI TEMPAT YANG TERHORMAT INI, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DEWAN YANG TELAH BERKENAN MEMBERIKAN WAKTU DAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN KATA SAMBUTAN DALAM RANGKA PEMBUKAAN MASA SIDANG III (KE TIGA) DPRK ACEH TENGGARA TAHUN 2026 UNTUK MEMBAHAS LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 DAN KUA PPAS PERUBAHAN TAHUN 2026 SERTA KUA PPAS MURNI TAHUN ANGGARAN 2027. LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 INI TELAH MENGACU PADA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. DIAWALI DENGAN KESESUAIAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (GOVERNMENT ACCOUNTING), PROSES REKONSILIASI SELURUH DATA KEUANGAN OPD, CAPAIAN TARGET KINERJA SELURUH OPD, PEMANFAATAN SUMBER DAYA EKONOMI DAN KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN OPD.

PERAN APIP (APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH) DALAM MENCAPAI SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG BAIK JUGA DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERJADI DI LAPANGAN. RINGKASAN DAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN TELAH DISAMPAIKAN KEPADA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DALAM BENTUK BUKU RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN 2025 YANG BERISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SERTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DISUSUN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU, SEBAGAIMANA TELAH KAMI SAMPAIKAN MELALUI SURAT DENGAN NOMOR : KU.900/393/2026 TANGGAL 30 JUNI 2026, UNTUK MENDAPAT PEMBAHASAN LEBIH LANJUT DARI ANGGOTA DEWAN TERHORMAT.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 SEBELUMNYA TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI ACEH. DARI HASIL AUDIT TERSEBUT, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI ACEH MEMBERIKAN **OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025**. OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TERSEBUT SUDAH 9 (SEMBILAN) KALI BERTURUT-TURUT KITA PEROLEH SAMPAI SAAT INI.

PEMERINTAH DAERAH, SANGAT BERKEPENTINGAN DENGAN HASIL AUDIT TERSEBUT KARENA BEBERAPA TAHUN TERAKHIR INI KEMENTERIAN KEUANGAN MENERAPKAN SISTEM REWARD AND PUNISHMENT (PENGHARGAAN DAN SANKSI) TERHADAP PEMERINTAH DAERAH. TERDAPAT TIGA KRITERIA DALAM PENILAIAN TERSEBUT, PERTAMA DAERAH TELAH MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT DENGAN BAIK, KEMUDIAN DAERAH MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TEPAT WAKTU DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK-RI. APABILA PEMERINTAH DAERAH MELAKSANAKAN KETIGA KRITERIA TERSEBUT DENGAN BAIK MAKA PEMERINTAH PUSAT AKAN MEMBERIKAN DANA INSENTIF.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR BAGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN EVALUASI DAN PERBAIKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KEDEPAN DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN AZAS Keadilan, Kepatuhan dan Manfaat untuk Masyarakat.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SELANJUTNYA PENJELASAN TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, AKAN DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PLENO BERIKUTNYA MELALUI PENGANTAR NOTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK YANG TELAH DIURAIKAN SECARA RINCI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN, MUDAH-MUDAHAN LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 YANG

DEWAN YANG TERHORMAT UNTUK DAPAT DITETAPKAN MENJADI QANUN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA.

DEMIKIANLAH KATA SAMBUTAN INI KAMI SAMPAIKAN, MUDAH-MUDAHAN RAPAT PLENO SELANJUTNYA BERJALAN LANCAR DAN BAIK. KAMI INGATKAN KEPADA SELURUH KEPALA OPD AGAR MENGIKUTI SEMUA AGENDA PERSIDANGAN INI DAN MENCATAT MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT UNTUK PERBAIKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

AKHIRNYA KEPADA TUHAN KITA BERSERAH DIRI DAN MEMOHON TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA. AMIN YARABIL ALAMIN.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, MOHON MAAF ATAS KEKURANGAN.

*BILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.* -----

6. SELANJUTNYA UNTUK MENDAPATKAN KEBERKAHAN DAN RIDHO DARI ALLAH SWT. MARILAH BERSAMA - SAMA KITA IKUTI PEMBCAAN DO'A YANG DIPIMPIN OLEH **USTADZ H. MULIA ARDI, S.PdI** KEPADA USTADZ KAMI PERSILAKAN. ---- **HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI** --- DENGAN BERAKHIRNYA PEMBACAAN DO'A TADI, MAKA SELESAILAH ACARA **PEMBUKAAN** RAPAT PARIPURNA KITA PADA HARI INI, UNTUK SELANJUTNYA RAPAT KAMI SKOR SELAMA 15 (LIMA BELAS) MENIT. (KETUKAN PALU 1 X). -----

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

SKOR KAMI CABUT KEMBALI

TOK..... (SATU KALI KETUKAN PALU)

HADIRIN PESERTA SIDANG YANG KAMI HORMATI.

1. ACARA KITA LANJUTKAN KEMBALI, DENGAN AGENDA PEMBACAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR, KEPADA SAUDARA SEKWAN KAMI PERSILAKAN :

KAMI LAPORKAN KEPADA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA BAHWA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR MENGENAI RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG III TAHUN 2025, TENTANG RANCANGAN QANUN RPJMK ACEH TENGGARA TAHUN 2025-2029, RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024, RANCANGAN QANUN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN, PENGESAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2025-2029, PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PENANDATANGANAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, ADALAH SABAGAI BERIKUT :

1. SURAT MASUK DARI FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA DPRK ACEH TENGGARA :
- NOMOR : 03/FHPB-DPRK/ AGR/AKD/ IV/ 2026 TANGGAL 06 APRIL 2026 TENTANG SURAT PENGUSULAN JABATAN ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH TENGGARA DARI FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA KABUPATEN ACEH TENGGARA.
2. SURAT MASUK DARI FRAKSI SELAYAKH YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA DPRK ACEH TENGGARA :
- NOMOR : 02/BA/FS/2026 TANGGAL 11 MEI 2026 TENTANG PERUBAHAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD) DI FRAKSI SELAYAKH.
3. SURAT MASUK DARI BUPATI ACEH TENGGARA YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA DPRK ACEH TENGGARA :
1. NOMOR KU.900/393/2026 TANGGAL 30 JUNI 2026 PRIHAL RANCANGAN QANUN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025,

2. NOMOR : 900/385/2026 TANGGAL 10 JULI 2026 PRIHAL PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027,

3. NOMOR : 900/420/2026 TANGGAL 29 JULI 2026 PRIHAL PENYAMPAIAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN RANCANGAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026.

2. SURAT KELUAR DARI DPRK ACEH TENGGARA YANG DITUJUKAN KEPADA BUPATI ACEH TENGGARA :

1. 900/ 118/ DPRK-AGR/ VIII/ 2026 TANGGAL 26 AGUSTUS 2026 TENTANG RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA SIDANG III TAHUN 2026 TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027 DAN NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026, PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA PERIODE 2024-2029 DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI LAPORKAN. -----

2. SELANJUTNYA PENGESAHAN TERTIB ACARA RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG III TAHUN 2026 TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKAN RANCANGAN KUA-PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027, PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN RANCANGAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026, PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029 DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029

BAPAK IBU ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI !

DI HADAPAN KITA MASING-MASING --- ADA RANCANGAN TERTIB ACARA RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG III TAHUN 2026 “**APAKAH RANCANGAN TERTIB ACARA INI DAPAT KITA SETUJUI ?**” MAKA PESERTA SIDANGPUN MENYATAKAN **SETUJU** --- MAKA PIMPINAN RAPAT MENGETUK PALU 1 X BAHWA RANCANGAN TERTIB ACARA ---TELAH DISETUJUI MENJADI TERTIB ACARA. (**TERTIB ACARA TERLAMPIR**) ----

SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI.

4. UNTUK SELANJUTNYA KITA MASUK KE ACARA BERIKUTNYA DENGAN AGENDA PEMBACAAN NOTA RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN 2025 DAN NOTA RANCANGAN QANUN RPJMK ACEH TENGGARA TAHUN 2025-2029 KEPADA SEKDA KAMI PERSILAKAN DENGAN SEGALA HORMAT :

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN!

- YTH. SDR. KETUA DPRK ACEH TENGGARA,**
YTH. SDR. PARA WAKIL KETUA, PARA KETUA FRAKSI DAN KETUA-KETUA KOMISI SERTA SELURUH ANGGOTA DPRK;
YTH. SDR. SEKDA, PARA ASISTEN, STAF AHLI;
YTH. SDR. PARA KEPALA OPD, PARA KABAG. DAN CAMAT;
YTH. SDR-SDRI. DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT, CERDIK PANDAI, TOKOH PEMUDA,
YTH. PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN PIMPINAN ORMAS, REKAN-REKAN DARI UNSUR LSM DAN PERS; TAMU UNDANGAN, SERTA HADIRIN HADIRAT SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

ALHAMDULILLAHIRABBIL’ALAMIN,DALAM MOMENTUM INI IZINKAN KAMI MENGAJAK BAPAK DAN IBU SEKALIAN UNTUK BERSAMA-SAMA MENGHATURKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT DAN IZIN-NYA, KITA DAPAT MENGHADIRI ACARA SIDANG PARIPURNA DPR KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN NOTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

SELANJUTNYA MARILAH BERSAMA-SAMA KITA UCAPKAN SHALAWAT BERIRING SALAM KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MEMBAWA PERUBAHAN POLA HIDUP UMAT MANUSIA MENJADI SEPERTI YANG KITA ALAMI SEKARANG INI.

PADA KESEMPATAN INI, KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN TERHORMAT, YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN KERJASAMA YANG BAIK TERHADAP PEMERINTAH DAERAH, SINERGITAS PERLU KITA BINA SEHINGGA TERLAKSANA TUGAS DAN FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN UNTUK TUJUAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025 MERUPAKAN RANGKAIAN DAN LANJUTAN DARI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT.

SELANJUTNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH DAN APRESIASI KEPADA SELURUH STAKEHOLDER TERKAIT BAIK PIHAK LEGISLATIF MAUPUN EKSEKUTIF DENGAN KERJASAMANYA PENCAPAIAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MERAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK-RI PERWAKILAN ACEH PADA TAHUN ANGGARAN 2025. PENYAMPAIAN OPINI WTP INI TIDAK TERLEPAS DARI DUKUNGAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SEBAGAI MITRA PEMERINTAH BAIK DALAM MENYUSUN ANGGARAN

DAN MELAKUKAN PENGAWASANNYA. OLEH KARENA ITU KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA,

MAKSUD DISUSUNNYA NOTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 INI UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN ATAS PROGRES PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM PENCAPAIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA PENDEK PEMBANGUNAN PADA TAHUN ANGGARAN 2025.

DALAM NOTA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK INI, DISAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG TERDIRI DARI :

- 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN;
- 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH;
- 3. NERACA;
- 4. LAPORAN OPERASIONAL;
- 5. LAPORAN ARUS KAS;
- 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN
- 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN DISAMPAIKANNYA NOTA PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 INI, KAMI BERHARAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DAPAT MEMBERIKAN PANDANGAN DAN MASUKAN GUNA MEMPERBAIKI SERTA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DIMASA-MASA YANG AKAN DATANG.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

PEMERINTAH DAERAH TELAH BERUPAYA MEMAKSIMALKAN PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH SERTA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SERTA PENANGANAN BENCANA.

SALAH SATU INDIKATOR KEBERHASILAN DARI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADALAH DENGAN TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA UMUM SEPERTI AKSES KESEHATAN, JALAN, JEMBATAN, PASAR, IRIGASI DAN JARINGAN AIR BERSIH YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT.

DALAM MENDUKUNG TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, PENINGKATAN KINERJA APARATUR, SERTA TERWUJUDNYA KINERJA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MAKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR, HARUS TERLAKSANA HAL INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH, SEHINGGA MEMILIKI KEMAMPUAN YANG DAPAT DIANDALKAN DALAM MENJAWAB DINAMIKA ZAMAN SECARA PROFESIONAL.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

DENGAN BERLANDASKAN KEPADA APBK PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025, KAMI SAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DI AUDIT OLEH BPK-RI UNTUK LEBIH RINCINYA KAMI URAIKAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM BENTUK REALISASI PENJABARAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 YANG MELIPUTI :

A. REALISASI PENDAPATAN DAERAH.

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH SETELAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 DIRENCANAKAN SEBESAR Rp1.345.351.171.303,00,- (*Satu triliun tiga ratus empat puluh lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah*). DENGAN UPAYA YANG DILAKUKAN SECARA MAKSIMAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MAKA SECARA KESELURUHAN dapat terealisasi sebesar Rp1.200.019.121.730,42,- (*Satu triliun dua ratus milyar sembilan belas juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah koma empat puluh dua sen*) atau 89,20%. terbagi atas :

- 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH direncanakan sebesar Rp137.031.502.594,00,- (*Seratus tiga puluh tujuh milyar tiga puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*) dengan upaya yang telah dilakukan dapat terealisasi sebesar Rp81.566.349.540,42,- (*Delapan puluh satu milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah koma empat puluh dua sen*) atau 59,52%,.
- 2. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN direncanakan sebesar Rp772.199.400.600,00,- (*Tujuh ratus tujuh puluh dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu enam ratus rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp764.558.730.322,00,- (*tujuh ratus enam puluh empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus duat puluh dua rupiah*) atau 99,01%.
- 3. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA direncanakan sebesar Rp319.964.187.998,00,- (*Tiga ratus sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp311.707.368.500,00,- (*Tiga ratus sebelas milyar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) atau 97,42%.
- 4. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI direncanakan sebesar Rp45.200.858.111,00,- (*Empat puluh lima milyar dua ratus juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus seratus sebelas rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp24.002.932.189,00,- (*Dua puluh empat milyar dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*) atau 53,10%.

5. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH direncanakan sebesar Rp70.955.222.000,00,- (*Tujuh puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp18.183.741.179,00,- (*Delapan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau 25,63%.
6. PENDAPATAN RIIL YANG MASUK KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025 sebesar Rp738.218.308.306,91,-(*Tujuh ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh satu sen*), sedangkan sisanya sebesar Rp461.800.813.423,51,- (*Empat ratus enam puluh satu milyar delapan ratus juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh satu sen*) merupakan pendapatan yang diterima dan dikelola langsung OPD teknis, dari total pendapatan sebesar Rp1.200.019.121.730,42 (*Satu triliun dua ratus milyar sembilan belas juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah koma empat puluh dua sen*). DAPAT KAMI JELASKAN PENDAPATAN INN OUT SEBAGAI BERIKUT:
 - a) TRANSFER DANA DESA SEBESAR Rp267.679.738.500,00,- (*Dua ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
 - b) DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) sebesar Rp113.844.213.900,00,- (*Seratus tiga belas milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah*).
 - c) PENDAPATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PUSKESMAS-PUSKESMAS sebesar Rp31.523.346.135,00,- (*Tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah*).
 - d) PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM H. SAHUDIN KUTACANE sebesar Rp48.753.514.888,51,- (*Empat puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen*).

B. REALISASI BELANJA

PADA TAHUN ANGGARAN 2025, ANGGARAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TERBAGI ATAS BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TAK TERDUGA DAN TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA. DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

BELANJA DAERAH direncanakan sebesar Rp1.389.533.265.834,00,-(*Satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp1.198.788.571.324,87,-(*Satu triliun seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma delapan puluh tujuh sen*) atau 86,27% terdiri atas :

1. BELANJA OPERASI direncanakan sebesar Rp892.877.564.854,00,- (*Delapan ratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp814.755.423.234,87,- (*Delapan ratus empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah koma delapan puluh tujuh sen*) atau 91,25%.
2. BELANJA MODAL direncanakan sebesar Rp153.666.831.980,00,- (*Seratus lima puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) terealisasi sebesar Rp61.972.133.034,00,- (*Enam puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah*) atau 40,33%.
3. BELANJA TAK TERDUGA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT/BENCANA ALAM direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00,- (*Lima milyar dua ratus juta rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp4.537.535.600,00,- (*Empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah*) atau 87,26%.
4. BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA direncanakan sebesar Rp337.788.869.000,00,- (*Tiga ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp317.523.479.456,00,- (*Tiga ratus tujuh belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) atau 94,00%.

B. REALISASI PEMBIAYAAN

REALISASI PEMBIAYAAN TERDIRI DARI REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DAN REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH. DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH direncanakan sebesar Rp44.182.094.531,00,- (*Empat puluh empat milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*) terealisasi sebesar Rp1.395.420.994,29,- (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu Sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh sembilan sen*) atau 3,16%.
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH sebesar Rp0,00 .
3. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN 2025 sebesar Rp2.625.971.399,84. (*Dua milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh empat sen*).

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIANLAH PENJELASAN SECARA GARIS BESAR TENTANG NOTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, SELANJUTNYA PENJELASAN YANG LEBIH RINCI UNTUK MASING-MASING AKUN PENERIMAAN DAN AKUN PENGELUARAN TELAH TERCANTUM PADA KOLOM TERSENDIRI DALAM LAPORAN REALISASI PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025.

KEPADA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA MASUKAN, SARAN DAN KOREKSI YANG TELAH DISAMPAIKAN SELAMA INI. MASUKAN, SARAN DAN KOREKSI DALAM NOTA PENGANTAR INI AKAN MENJADI PEDOMAN BAGI KAMI DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN KEDEPAN.

AKHIRNYA KEPADA ALLAH SWT KITA MEMOHON AMPUNAN, SEMOGA KITA SENANTIASA MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN PETUNJUK YANG BENAR DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN. AMIN.

WABILLAH TAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKATUH.

KUTACANE, 27 AGUSTUS 2026
BUPATI ACEH TENGGARA,



H. M. SALIM FAKHRY, SE., M.M -----

SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI.

4. DENGAN TELAH DIBACAKANNYA NOTA RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH SAUDARA SEKDA TADI --- MAKA RAPAT PARIPURNA INI KAMI **SKOR** DAN AKAN KITA LANJUTKAN SETELAH SELESAI **SHOLAT DZUHUR** TEPATNYA PUKUL 14.00 WIB DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM ANGOTA DPRK ACEH TENGGARA DARI FRAKSI-FRAKSI.

RAPAT KAMI SKOR.

TOK.... (SATU KALI KETUKAN PALU)

BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB -----

ASSALAMU' ALAIKUM WR. WB
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

SKOR KAMI CABUT KEMBALI

TOK.... (SATU KALI KETUKAN PALU)

HADIRIN PESERTA SIDANG YANG KAMI HORMATI

SEBAGAIMANA YANG KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA PAGI MENJELANG SIANG TADI AGENDA KITA ADALAH PENYAMPAIAN NOTA RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025. KINI SAATNYA KITA BERANJAK KE ACARA SELANJUTNYA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA DARI FRAKSI-FRAKSI.

UNTUK KESEMPATAN YANG PERTAMA, KAMI PERSILAKAN KEPADA **FRAKSI GOLKAR** UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA :

I. PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR :

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.
SELAMAT SIANG SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

- YANG TERHORMAT SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI ACEH TENGGARA
- YANG KAMI HORMATI, PARA ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE ACEH TENGGARA.
- YANG KAMI HORMATI PARA TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, ORGANISASI POLITIK, PROFESI, PEMUDA, UNSUR PERS, SERTA REKAN-REKAN LSM DAN SELURUH HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA.
- PARA HADIRIN TAMU DAN UNDANGAN SEKALIAN YANG KAMI MULIAKAN

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG SENANTIASA MEMBERI KITA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA SEHINGGA KITA DAPAT HADIR DI RUANGAN YANG BERBAHAGIA INI DALAM RANGKA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG KE III TAHUN 2026, TENTANG **RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027, NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN 2026, PERUBAHAN TATA TERTIB DDEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MASA JABATAN 2024 – 2029 DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

SELANJUTNYA YANG SE AQIDAH DENGAN KAMI MARILAH SAMA-SAMA KITA UCAPKAN SHALAWAT BERIRING SALAM KEPADA JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA DAN SAHABAT, YANG TELAH MEMBAWA KITA DARI ALAM JAHILIYAH KE ALAM YANG BERIMAN DAN BERILMU PENGETAHUAN, SEHINGGA KITA HARI INI MAMPU MENGENDALIKAN DIRI DALAM MENJALANKAN AMANAH YANG DIBERIKAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI – HARI.

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI DAN PARA HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

TERIMA KASIH KAMI UCAPKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI DARI FRAKSI GOLKAR UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI. BERDASARKAN UNDANG – UNDANNG NOMOR 32 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DEFENISI ATAU ARTI OTONOMI DAERAH ADALAH HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN. SEPERTI KITA KETAHUI BERSAMA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BERDASARKAN PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, ADALAH MEMBERIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH, DENGAN TUJUAN AGAR MAJU PESATNYA PROSES PEMBANGUNAN SECARA NASIONAL, PELAKSANAAN PEMERINTAHAN TERSEBUT TENTUNYA AKAN BERHASIL APABILA DI DUKUNG DENGAN PROGRAM-PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DAPAT DI IMPLEMENTASIKAN SECARA TEPAT, AKUNTABEL, DAN BERKUALITAS TANPA MENGESAMPINGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT.

DARI SEDERET RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, TENTUNYA TIDAK TERLEPAS DARI KOMITMEN KITA BERSAMA SEBAGAI PELAKSANA PEMERINTAH DAERAH YAITU, EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, SEBAGAI MITRA PEMERINTAHAN YANG SEJALAN, SEIRING, DENGAN PROPESSIONAL. GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELEGIOUS, BERBUDAYA, MANDIRI UNGGUL DAN SEJAHTERA.

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI DAN ANGGOTA DEWAN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI.

SEBELUM MENGAWALI PANDANGAN UMUM TENTANG LPP APBK TA. 2025 INI KAMI DARI FRAKSI MENGAPRESIASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH, BAIK PIHAK EKSEKUTIF MAUPUN LEGISLATIF, SEHINGGA DENGAN KERJASAMA YANG BAIK INILAH MAKA PEMERINTAH DAERAH MENDAPAT PENCAPAIAN DALAM MERAHAI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK-RI PERWAKILAN ACEH SEBANYAK 9 KALI BERTURUT-TURUT YANG KITA DEDIKASIKAN PENGHARGAAN WTP INI KEPADA SEMUA ELEMEN MASYARAKAT ACEH TENGGARA YANG SELAMA INI TELAH BEKERJA KERAS DAN IKUT MENDUKUNG TERWUJUDNYA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL. OPINI WTP YANG TELAH KITA TERIMA INI, HENDAKNYA MENJADI PENYEMANGAT DAN PENAMBAH MOTIVASI BAGI KITA SEMUA KHUSUSNYA INSTANSI TERKAIT DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGANNYA DAN MENINDAK LANJUTI TEMUAN YANG ADA SESUAI DENGAN ARAHAN BPK-RI

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI, SERTA TAMU UNDANGAN YANG KAMI HORMATI

DEMI KEBAIKAN DAN KEMAJUAN KITA BERSAMA, FRAKSI GOLKAR TETAP KONSISTEN UNTUK MELUANGKAN WAKTUNYA DALAM MENCERMATI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TA 2025, DI SAMPING ITU, DI TENGAH TUNTUTAN ATAS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TENTUNYA DALAM PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN MENJADI PERHATIAN UTAMA BAGI KITA SEMUA, OLEH KARENA ITU, UNTUK MENILAI LAPORAN REALISASI APBK TAHUN ANGGARAN 2024 INI, TENTU BUKANLAH SEKEDAR MENILAI AKTIFITAS TEKNIS DALAM MENGHITUNG MASUKAN (INPUT) DANA, PROSES PENGELOLAAN, DAN EFEKTIVITAS MAUPUN EFISIENSI ANGGARAN SAJA, MELAINKAN JUGA UNTUK MENELAHAH MAMFAAT DAN KEGUNAAN SETIAP ARAH PEMBANGUNAN AGAR LEBIH TRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN SERTA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT.

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI, DAN ANGGOTA DEWAN SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT

UNTUK MELENGKAPI HASIL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TA 2025 INI KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMBERIKAN BEBERAPA CATATAN YANG KAMI ANGGAP PATUT MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA YAITU :

TERKAIT REALISASI PENDAPATAN DAERAH.

BERDASARKAN NOTA PENGANTAR YANG SAUDARA BUPATI SAMPAIKAN TERKAIT RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR Rp1.345.351.171.303,00,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*). YANG HANYA DAPAT TEREALISASI SEBESAR Rp1.200.019.121.730,42,- (*Satu triliun dua Ratus Milyar Sembilan Belas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh rupiah koma Empat Puluh Dua Sen sen*) atau 89,20%. terbagi atas :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH direncanakan sebesar Rp137.031.502.594,00,- (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) TEREALISASI SEBESAR 81.566.349.540,42,- (*Delapan Puluh Stu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Lima Ratus Empat Puluh Koma Empat Puluh Dua Sen*) atau 59,52%,.
2. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN direncanakan sebesar Rp 772.199.400.600,00,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah*) DAPAT TEREALISASI SEBESAR Rp764.558.730.322,00,- (*Tujuh Ratus Enam*

Puluh Em,pat MilyarLima Ratus Lima Puluh Delapan juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua) atau 99,01%.

3. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA direncanakan sebesar Rp319.964.187.998,00,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan rupiah) TEREALISASI SEBESAR 311.707.368.500,00,- (Tiga Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 97,42%
4. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI DIRENCANAKAN SEBESAR Rp45.200.858.111,00,- (Empat puluh Lima milyardua ratus juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) TEREALISASI SEBESAR Rp24.002.932.189,00,- (Dua Puluh Empat Milyar Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 53,10%.
5. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH direncanakan sebesar Rp70.955.222.000,00,- (Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) Dapat Terealisasi sebesar Rp18.183.741.179,00,- (Delapan Belas Milyar 183 Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupaih) atau 25,63%

B. REALISASI BELANJA

PADA TAHUN ANGGARAN 2025, ANGGARAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TERBAGI ATAS BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TAK TERDUGA DAN TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA. DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

BELANJA DAERAH direncanakan sebesar Rp1.389.533.265.834,00,-(Satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp1.198.788.571.324,87,-(Satu triliun seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma delapan puluh tujuh sen) atau 86,27%

BERDASARKAN HAL TERSEBUT KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MENILAI MASIH KURANGNYA UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TARGET PAD MAKA DARI ITU KAMI DARAI FRAKSI GOLKAR MENDORONG KESERiusAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI SAUDARA BUPATI AGAR DAPAT MENINGKATKAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG DAPAT KITA LAKUKAN DARI BEBERAPA CARA SPERTI :

MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH: MELAKUKAN ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI, MEMPERBAIKI SISTEM PEMUNGUTAN, DAN MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK.

MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN ASET DAERAH: MENINGKATKAN PENDAPATAN DARI ASET DAERAH SEPERTI TANAH, BANGUNAN, DAN SUMBER DAYA ALAM.

MENINGKATKAN INVESTASI: MENAWARKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR UNTUK BERINVESTASI DI DAERAH.

MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA: MENINGKATKAN PENDAPATAN DARI SEKTOR PARIWISATA MELALUI PROMOSI DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA.

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DARI RETRIBUSI DAN BIAYA LAYANAN YANG ADA DI ACEH TENGGARA.

SELANJUTNYA, KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMEBERIKAN BEBERAPA CATATAN TERKAIT HASIL EKSPOSE KOMISI – KOMISI DENGAN OPD TERKAIT SEBAGAI MITRA KERJA TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN 2025 YANG DILAKSANAKAN TANGGAL 3 S/D 7 AGUSTUS 2026, YAITU :

1. SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2023 TERKAIT DANA BAGI HASIL (DBH) SAWIT DAN DI PERBAHARUI PENGELOLAANNYA MELALUI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10 TAHUN 2026. BAHWA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT YANG AKUNTABEL DAN MENDORONG PENGGUNAAN OLEH DAERAH SECARA OPTIMAL DAN TEPAT SASARAN PERLU DI SUSUN PERATURAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT BESARAN ALOKASI YANG DITETAPKAN MINIMAL SEBESAR 4% DARI PENERIMAAN NEGARA DI SETOR UNTUK DAERAH PENGHASIL DAN ALOKASI DI BAGIKAN KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA BERDASARKAN INDIKATOR LUAS LAHAN PERKEBUNAN DAN PROKDUKTIVITASNYA DI MANA FOKUS PENGGUNAANNYA DI TUJUKAN KEPADA INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN LOGISTIK ATAU JALAN DAERAH YANG RUSAK AKIBAT ANGKUTAN SAWIT. MAKA DARI ITU KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMINTA KEPADA PEMEMRINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN PERKEBUNAN SAWIT DAN PROGRAM SERTIFIKASI AGAR DBH SAWIT INI DAPAT TEREALISASI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG TELAH RUSAK DAN SULIT UNTUK DILALUI OLAH MSYARAKAT SALAH SATUNYA SEPERTI JALAN MERANTI – LUMBAN TUA KECAMATAN BABUL RAHMAH YANG SAMPAI SAAT INI BELUM TEREALISASI SEPENUHNYA. SELAIN KAMI JUGA MENGHARAPKAN PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN JAMBUR MAMANG – LAWE MEKHUNTUH KECAMATAN DARUL HASANAH YANG SAAT INI SANGAT DIBUTUHKAN MASYARAKAT SEBAGAI JALAAAN UTAMA DALAM PENDISTRIBUSIAN HASIL BUMI DAERAH SEKITARNYA.
2. TERKAIT PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT SEPERTI PENYALAHGUNAAN NARKOBA, PERJUDIAN, PENCURIAN, PROSTITUSI DLL. KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMINTA KEPADA DINAS TERKAIT SEPERTI DINAS SYARIAT ISLAM, SATPOL PP DAN WH SERTA APARAT PENEGAK HUKUM LEBIH AKTIF DALAM MELAKUKAN RAZIA PAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH, RAZIA SEKALIGUS PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG SELAMA INI SEMAKIN MERESAHKAN MASYARAKAT. RAZIA PEKAT TEMPAT TEMPAT MAKSIAT SEPERTI YANG SELAMA INI MARAK DI KECAMATAN DELENG POKHISON
3. TERKAIT PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KEADILAN ANGGARAN UNTUK DAERAH DAERAH TERPENCIL. SEPERTI KITA KETAHUI WILAYAH ACEH TENGGARA MENCAKUP WILAYAH YANG CUKUP

LUAS SERTA LETAK GEOGRAFIS YANG SULIT UNTUK DICAPAI SEPERTI KECAMATAN LEUSER. UNTUK ITU KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR MEMBERIKAN KEADILAN ANGGARAN UNTUK DAERAH TERPENCIL SEPERTI TRANSFER KE DAERAH (TKD) DAN DANA DESA, YANG HARUS DISESUAIKAN DENGAN TANTANGAN GEOGRAFIS DAN KAPASITAS FISKAL AGAR PEMBANGUNAN TIDAK TIMPANG. INI BISA DILAKUKAN DENGAN REFORMULASI KEBIJAKAN TKD, PENDAMPINGAN TATA KELOLA DAN PROGRAM AFIRMATIF TEPAT SASARAN INOVASI PELAYAN PUBLIK BAIK DIBIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

4. TERKAIT DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAAAN DAN OLAH RAGA. KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMINTA KEPADA DINAS TERKAIT AGAR LEBIH INOVATIF DALAM PENGEMBANGAN OBJEK DAN DESTINASI WISATA LOKAL TIDAK HANYA TERFOKUS PADA WISATA ALAM KETAMBE SERTA ARUNG JERAM SAJA. SELAIN ITU KAMI JUGA MEMINTA KEPADA DINAS TERKAIT UNTUK LEBIH AKTIF DALAM PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG SAAT INI SEPERTI MATI SURI ,TIDAK ADANYA LAGI EVENT OLAH RAGA YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI AJANG PENCARIAN BIBIT BIBIT UNGGUL SEPERTI ATLIT SEPAKBOLA, ATLIT ATLETIK DLL. DAN DENGAN DIADAKAN NYA EVENT EVEN TERSEBUT YANG JUSTRU SEBENARNYA DAPAT MENINGKATKAN PAD ACEH TENGGARA
5. TERKAIT DINAS KESEHATAN, KAMI MELIHAT PERLUNYA UJNTUK MENGAKTIFKAN FASILITAS – FASILITAS PUSKESDES DAN PUSTU YANG SAAT INI GEDUNGNYA JUSTRU BANYAK DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHANNYA.
6. TERKAIT MASALAHAH MTQ PROVINSI ACEH TAHUN 2025, ACEH TENGGARA BERADA DI PERINGKAT 23 DARI 23 KABUPATEN/KOTA. KONDISI INI SEHARUSNYA MENJADI BAHAN EVALUASI SERIUS. NAMUN SUNGGUH DISAYANGKAN PADA TAHUN 2026 TIDAK TERSEDIA ANGGARAN PELAKSANAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN DAN KABUPATEN. PADALAH MTQ TINGKAT KECAMATAN MERUPAKAN BAHAGIAN PENTING DALAM PENJARINGAN BIBIT BIBIT UNTUK DIBINA SEBAGAI PERWAKILAN KABUPATEN DALAM AJANG MTQ TINGKAT YG LEBIH TINGGI.
7. TERKAIT PILKADES SERENTAK, KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMBERIKAN APPRESIASI ATAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KHUSUSNYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KUTE DALAM PENERBITAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PENGULU SERENTAK DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA SERTA PERILISAN TAHAPAN PELAKSANAAN PENGULU SERENTAK 2026. DAN KAMI DARI FRAKSI GOLKAR BERHARAP DENGAN BERJALANNYA TAHAPAN – TAHAPAN INI TIDAK HANYA MELIBATKAN DPMK SAJA TAPI MENGGANDENG SEMUA ELEMEN TERKAIT AGAR TURUT SERTA BERPARTISIPASI DEMI TERCAPAINYA PEMILIHAN JUJUR, ADIL, AMAN DAN DAMAI UNTUK KEMASLAHATAN KITA BERSAMA.
8. TERKAIT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA DINAS TERKAIT ATAS PENCAPAI TERBAIK KE-7 SE-ACEH PADA PENILAIAN PEKPP NASIONAL TAHUN 2026 UNTUK PELAYANAN PUBLIK TERBAIK. DENGAN ADANYA PERNGHARGAAN INI HENDAKNYA DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN – PELAYANAN YANG LEBIH BAIK LAGI. SESUAI DENGAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI 5 (LIMA) ZONA YANG TELAH DITENTUKAN.
9. TERKAIT DINAS PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR DAPAT MEMBERIKAN REWARD DAN PENGHARGAAN ATAS TERCAPANYA PAD YANG DI AMANATKAN KEPADA DINAS TERKAIT. INI PERLU DILAKUKAN AGAR MENJADI CONTOH YANG BAIK DAN MENJADI BAROMETER KEPADA DINAS – DINAS YANG LAIN UNTUK PENCAPAIAN PAD KITA
10. PADA KESEMPATAN DALAM RAPAT PARIPUNA MASA SIDANG III TAHUN 2026, SECARA KHUSUS KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH TENGGARA ATAS PENDAFTARAN DUA VARIETAS DURIAN LOKAL ACEH TENGGARA, YAITU DURIAN JONSON DARI LEUSER DAN DURIAN JANTUONG DARI SUKARIMBUN. DENGAN DIKENALKANNYA VARIETAS DURIAN LOKAL SEBAGAI UNGGULAN DARI KABUPATEN ACEH TENGGARA KITA SEMUA BERHARAP AGAR DAPAT BERSAING DENGAN DURIAN DURIAN LUAR DIPASARAN NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL. HAL INI TENTU DAPAT MENJADI KEBANGGAAN KITA BERSAMA

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI DAN ANGGOTA DEWAN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI.

FRAKSI GOLKAR MENEGASKAN, DALAM MENJAMIN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN QANUN INI, PERLU DITINDAK LANJUTI DENGAN PERATURAN BUPATI YANG MEMUAT PETUNJUK TEKNIS SECARA KOMPREHENSIF, TERUKUR, DAN BERKESINAMBUNGAN, SEHINGGA AMANAT QANUN INI DAPAT DI IMPLEMENTASIKAN TEPAT SASARAN DAN DAPAT DILAKSANAKAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT ACEH TENGGARA, KHUSUSNYA DI BIDANG KEPEMUDAAN YANG SESUAI DENGAN VISI-MISI SAUDARA BUPATI ACEH TENGGARA DALAM **MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN ACEH TENGGARA MENUJU MASYARAKAT YANG MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN BERMARTABAT DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT."**

KAMI DARI FRAKSI GOLKAR BERHARAP SEMOGA QANUN INI MENJADI SUATU KEBIJAKAN DAERAH YANG MAMPU MEMBERDAYAKAN, MELINDUNGI, DAN MENGEMBANGKAN POTENSI PEMUDA ACEH TENGGARA, SEHINGGA PEMUDA ACEH TENGGARA DAPAT MENJADI PELOPOR, PENGGERAK, DAN PEMIMPIN MASA DEPAN DAERAH YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI DAN ANGGOTA DEWAN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARA 2027

KUA DAN PPAS ADALAH DOKUMEN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH YANG DISUSUN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRK SEBAGAI PEDOLMAN PENYUSUNAN APBK. KAMI MENGINGATKAN KEPADA EKSEKUTIF DAERAH AGAR MELAKUKAN SINGKRONISASI KEBIJAKAN, BAIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN.

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI DAN ANGGOTA DEWAN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
RAKSI GOLKAR BERPANDANGAN BAHWA ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD) MERUPAKAN BAGIAN PENTING DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD, KHUSUSNYA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, FUNGSI ANGGARAN, SERTA FUNGSI PENGAWASAN.

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN HENDAKNYA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, SERTA KEPENTINGAN MASYARAKAT.

FRAKSI GOLKAR MENILAI BAHWA KOMPOSISI AKD HARUS MAMPU MENCERMINKAN KETERWAKILAN SELURUH UNSUR POLITIK YANG ADA DI DPRD SECARA PROPORSIONAL. PENEMPATAN ANGGOTA PADA MASING-MASING AKD JUGA PERLU MEMPERTIMBANGKAN KOMPETENSI, PENGALAMAN, KEMAMPUAN, SERTA KOMITMEN ANGGOTA DEWAN AGAR SETIAP ALAT KELENGKAPAN DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA SECARA OPTIMAL.

FRAKSI GOLKAR JUGA MENEKANKAN PENTINGNYA SINERGI ANTARA PIMPINAN DPRD, KOMISI-KOMISI, BADAN ANGGARAN, BADAN MUSYAWARAH, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BADAN KEHORMATAN, SERTA ALAT KELENGKAPAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

KEBERADAAN AKD JANGAN HANYA DIPANDANG SEBAGAI PEMBAGIAN POSISI ATAU STRUKTUR KELEMBAGAAN SEMATA, TETAPI HARUS BENAR-BENAR MENJADI INSTRUMEN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA DPRD DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN MENGAWAL PEMBANGUNAN DAERAH.

OLEH KARENA ITU, FRAKSI GOLKAR BERHARAP SELURUH PROSES PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AKD DAPAT DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS, TERBUKA, TERTIB, DAN BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN DAERAH SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

FRAKSI GOLKAR MENDUKUNG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN YANG DAPAT BEKERJA SECARA EFEKTIF, SOLID, BERTANGGUNG JAWAB, DAN MAMPU MENJALANKAN FUNGSI DPRD SECARA OPTIMAL SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

DEMIKIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR INI KAMI SAMPAIKAN. SEMOGA SELURUH PROSES PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAPAT BERJALAN DENGAN LANCAR DAN MENGHASILKAN KOMPOSISI YANG MAMPU MENINGKATKAN KINERJA DPRD SERTA MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI MASYARAKAT.

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI DAN ANGGOTA DEWAN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM NOTATA TERTIB DPRK

FRAKSI GOLKAR BERPANDANGAN BAHWA TATA TERTIB DPRD MERUPAKAN INSTRUMEN PENTING DALAM MENGATUR MEKANISME, TATA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, SERTA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRK. OLEH KARENA ITU, PERUBAHAN TATA TERTIB HARUS DILAKUKAN SECARA CERMAT, TERUKUR, DAN TETAP BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

FRAKSI GOLKAR PADA PRINSIPNYA MENDUKUNG PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK SEPANJANG PERUBAHAN TERSEBUT BENAR-BENAR DIPERLUKAN UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN REGULASI, KEBUTUHAN KELEMBAGAAN, SERTA DINAMIKA PELAKSANAAN TUGAS DPRK.

PERUBAHAN TATA TERTIB HENDAKNYA TIDAK HANYA BERSIFAT ADMINISTRATIF, TETAPI MAMPU MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN KEJELASAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PENGANGGARAN, DAN PENGAWASAN.

FRAKSI GOLKAR JUGA MENEKANKAN BAHWA SETIAP PERUBAHAN KETENTUAN DALAM TATA TERTIB HARUS MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PROPORSIONALITAS, EFEKTIVITAS, SERTA PENGHORMATAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ANGGOTA DPRD.

SELAIN ITU, PENGATURAN MENGENAI ALAT KELENGKAPAN DEWAN, MEKANISME RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBAHASAN ANGGARAN, PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT, SERTA KETENTUAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS DPRD PERLU DIRUMUSKAN SECARA JELAS AGAR TIDAK MENIMBULKAN MULTITAFSIR DALAM PELAKSANAANNYA.

FRAKSI GOLKAR BERPANDANGAN BAHWA TATA TERTIB HARUS MENJADI PEDOMAN BERSAMA BAGI SELURUH ANGGOTA DPRD DALAM MENJALANKAN TUGAS SECARA TERTIB, DISIPLIN, PROFESIONAL, DAN BERTANGGUNG JAWAB. KARENA ITU, SETIAP PERUBAHAN HENDAKNYA MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN KELEMBAGAAN DPRD DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, BUKAN KEPENTINGAN KELOMPOK ATAU INDIVIDU.

KAMI JUGA BERHARAP PROSES PEMBAHASAN PERUBAHAN TATA TERTIB DAPAT DILAKUKAN SECARA TERBUKA DAN KONSTRUKTIF DENGAN MELIBATKAN SELURUH UNSUR DPRD, SEHINGGA MENGHASILKAN REGULASI INTERNAL YANG MAMPU MEMPERKUAT KELEMBAGAAN SERTA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA DPRD.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT, FRAKSI GOLKAR MENYATAKAN DAPAT MENERIMA DAN MENDUKUNG PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD UNTUK DIBAHAS DAN DITETAPKAN SESUAI DENGAN MEKANISME SERTA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DENGAN TETAP MEMBERIKAN RUANG TERHADAP PENYEMPURNAAN SUBSTANSI APABILA DALAM PROSES PEMBAHASAN MASIH DITEMUKAN KETENTUAN YANG PERLU DIPERBAIKI.

DEMIKIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR INI KAMI SAMPAIKAN. SEMOGA PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD DAPAT MENJADI LANDASAN YANG SEMAKIN KUAT BAGI DPRD DALAM MENJALANKAN AMANAH RAKYAT SERTA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN BERPIHAK PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT.

PIMPINAN SIDANG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN ANGGOTA DEWAN RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT

DEMIKIANLAH PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR ATAS RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

BILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.

**KUTACANE, 27 AGUSTUS 2026
FRAKSI PARTAI GOLKAR**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ARNOLD, SH	Ketua	dto.....
2	MIRZA AL MAHBUBI, ST, MT	Wakil Ketua	dto.....
3	PUTRI NIKEN JILE, Bbs	Anggota	dto.....
4	Dr. DENNY FEBRIAN ROZA, M.Si	Anggota	dto.....
5	DIAN REZA PAHLEVI, SH	Anggota	dto.....
6	SAMUARIADI, ST, M.,Si	Anggota	dto.....
7	MARAWAL HAKIM	Anggota	dto.....
8	MUSLIADI	Anggota	dto.....
9	INTAN PERMATASARI	Anggota	dto.....
10	ABI HASAN, SH	Anggota	dto.....
11	KAMIRUN MUNTHE	Anggota	dto.....
12	MARUAN HANAFI	Anggota	dto.....
13	BUSTAMI RAMUD	Anggota	dto.....

TERIMA KASIH KEPADA **FRAKSI GOLKAR** YANG TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA, UNTUK KESEMPATAN YANG KEDUA KAMI PERSILAKAN KEPADA **FRKASI PAN** UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA. -----

II. PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN

**BISMILLAH HIRRAHMANNIRRAHIM
ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.**

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

PERTAMA DAN YANG UTAMA SEBAGAI UMMAT YANG BERTAQWA KEPADA ALLAH SWT MARILAH KITA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT,DENGAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA LAH, PADA HARI INI KITA DAPAT BERSAMA-SAMA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL-AFIAT.

YANG SEAKIDAH DENGAN KAMI SELAWAT BERANGKAIKAN SALAM SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW. KARENA BERKAT PERJUANGAN BELIAU KITA DAPAT MEMBEDAKAN BAIK DAN BURUK.

RASA HORMAT KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN RAPAT SIDANG PARIPURNA YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI DALAM HAL INI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) TERHADAP RANCANGAN QANUN TAHUN 2026 KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

1. YANG KAMI HORMATI PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGGARA;
2. YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI DALAM HAL INI DIWAKILI SAUDARA SEKDA ACEH TENGGARA BESERTA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN ACEH TENGGARA;
3. YANG KAMI HORMATI PARA ASISTEN, STAF AHLI, SERTA SELURUH KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) DAN JAJARAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA;
4. PARA TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, TOKOH MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, INSAN PERS, SERTA SELURUH UNDANGAN DAN MASYARAKAT BUMI SEPAKAT SEGENEP YANG KAMI BANGGAKAN.

RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,

SEBELUM MELANGKAH LEBIH JAUH, IZINKAN KAMI DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN TERIMA KASIH SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

EVALUASI DAN PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN INI BUKAN SEKADAR PEMENUHAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BELAKA. LEBIH DARI ITU, INI ADALAH MOMEN KRUSIAL BAGI KITA BERSAMA UNTUK MENGUKUR SEJAUH MANA EFEKTIVITAS, AKUNTABILITAS, DAN KEBERPIHAKAN ANGGARAN DAERAH DALAM MENJAWAB TANTANGAN PEMBANGUNAN SERTA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA.

DENGAN SEMANGAT KEMITRAAN YANG KONSTRUKTIF DAN IKTIKAD BAIK DEMI KEMAJUAN DAERAH YANG KITA CINTAI, BERIKUT INI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) MENYAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN, MASUKAN, DAN PERTANYAKAN STRATEGIS TERKAIT PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 SEBAGAI BERIKUT :

1. TERHADAP DINAS PENDIDIKAN
 1. FRAKSI KAMI MASIH MENEMUKAN KETIMPANGAN FASILITAS ANTAR-SEKOLAH, TERUTAMA DI WILAYAH PELOSOK/PINGGIRAN. KAMI MEMINTA PENJELASAN DINAS PENDIDIKAN TERKAIT POLA DISTRIBUSI ANGGARAN REHABILITASI RUANG KELAS, LABORATORIUM, DAN FASILITAS SANITASI SEKOLAH PADA TA 2025.
 2. TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN DAN PENDISTRIBUSIAN GURU (TERMASUK PPPK DAN TENAGA HONORER), BAGAIMANA STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DALAM MENGATASI PENUMPUKAN GURU DI KAWASAN PERKOTAAN DAN KURANG GURU DI DAERAH TERPENCIL? SERTA BAGAIMANA KEPASTIAN PENCAIRAN INSENTIF/TUNJANGAN GURU TEPAT WAKTU?
 3. SELAIN PEMBANGUNAN FISIK, KAMI MEMINTA PENJELASAN MENGENAI SEJAUH MANA ANGGARAN TA 2025 DIALOKASIKAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS/PELATIHAN KOMPETENSI GURU SERTA INTEGRASI NILAI-NILAI KEBUDAYAAN LOKAL ACEH TENGGARA DALAM KURIKULUM PEMBELAJARAN.
2. TERHADAP DINAS KESEHATAN
 1. FRAKSI PAN MEMINTA PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS KESEHATAN AGAR MENINGKATKAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN KESEHATAN. SETIAP PROGRAM YANG TELAH DIANGGARKAN HENDAKNYA DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT SERTA DAPAT DIUKUR CAPAIAN DAN MANFAATNYA.
 2. FRAKSI PAN JUGA MENYOROTI PENTINGNYA PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN, KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT YANG BERADA DI WILAYAH TERPENCIL DAN SULIT DIJANGKAU. KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN, OBAT-OBATAN, SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN, SERTA PENINGKATAN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH DAERAH.
 3. FRAKSI PAN PADA PRINSIPNYA MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SEKTOR KESEHATAN, NAMUN DUKUNGAN TERSEBUT HARUS DISERTAI DENGAN KOMITMEN UNTUK MELAKUKAN EVALUASI, PERBAIKAN, DAN PENGAWASAN SECARA

BERKELANJUTAN AGAR PENGELOLAAN APBK DI BIDANG KESEHATAN SEMAKIN TEPAT SASARAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA MASYARAKAT.

4. FRAKSI PAN MEMINTA DINAS KESEHATAN MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SECARA BERKALA TERHADAP SELURUH PUSKESMAS AGAR PENGELOLAAN ANGGARAN SEMAKIN TERTIB DAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT DAPAT BERJALAN SECARA OPTIMAL, PROFESIONAL, DAN BERKEADILAN.

3. TERHADAP PUSKESMAS

FRAKSI PAN MEMBERIKAN PERHATIAN TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN PUSKESMAS KELILING (PUSLING) PADA PUSKESMAS SE-KABUPATEN ACEH TENGGARA. KENDARAAN PUSLING MERUPAKAN SALAH SATU SARANA PENTING DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN, KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT YANG BERADA DI WILAYAH TERPENCIL, PEDALAMAN, DAN DAERAH YANG SULIT MEMPEROLEH AKSES PELAYANAN KESEHATAN.

- FRAKSI PAN MEMINTA PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS KESEHATAN UNTUK MEMASTIKAN KENDARAAN PUSLING BENAR-BENAR DIGUNAKAN SESUAI DENGAN FUNGSI DAN PERUNTUKANNYA, YAITU UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT. PENGGUNAAN KENDARAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN SECARA TERTIB, TERJADWAL, DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, TERMASUK DALAM HAL PENCATATAN PERJALANAN, PEMAKAIAN BAHAN BAKAR, PEMELIHARAAN, SERTA BIAYA OPERASIONAL.
- KAMI JUGA MEMINTA AGAR DILAKUKAN PENDATAAN DAN EVALUASI TERHADAP SELURUH KENDARAAN PUSLING YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH PUSKESMAS, MELIPUTI KONDISI KENDARAAN, STATUS PENGGUNAANNYA, INTENSITAS PELAYANAN, SERTA WILAYAH YANG DILAYANI. APABILA TERDAPAT KENDARAAN PUSLING YANG TIDAK BEROPERASI SECARA OPTIMAL ATAU MENGALAMI KERUSAKAN, PEMERINTAH DAERAH PERLU SEGERA MENGAMBIL LANGKAH PERBAIKAN AGAR ASET TERSEBUT TIDAK MENJADI BEBAN ANGGARAN TANPA MEMBERIKAN MANFAAT YANG MAKSIMAL KEPADA MASYARAKAT.
- KHUSUS BAGI WILAYAH TERPENCIL DAN SULIT DIJANGKAU, FRAKSI PAN MENDORONG AGAR PEMANFAATAN KENDARAAN PUSLING YANG MENGGUNAAKAN KENDARAAN SEGALA MEDAN DAN DIPRIORITASKAN UNTUK PELAYANAN PROMOTIF, PREVENTIF, PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR, PELAYANAN IBU DAN ANAK, SERTA KEGIATAN KESEHATAN MASYARAKAT LAINNYA SESUAI KEBUTUHAN WILAYAH.

RAPAT DEWAN , HADIRIN WAL HADIRAT YANG BERBAHAGIA.

4. TERHADAP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- ❖ PEMENUHAN DAN PEREMAJAAN KOLEKSI BUKU (BAIK FISIK MAUPUN DIGITAL) AGAR LEBIH DITINGKATKAN LAGI, DI SAMPING ITU, KETERJANGKAUAN DAN FREKUENSI OPERASIONAL *PERPUSTAKAAN KELILING* DALAM MELAYANI MASYARAKAT, SEKOLAH-SEKOLAH, DAN ANAK-ANAK DI WILAYAH *KUTE*/DESA TERPENCIL AGAR DAPAT DIMAKSIMALKAN
- ❖ DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL SAAT INI, SEJAUH MANA ALOKASI ANGGARAN TA 2025 DIMANFAATKAN UNTUK PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL (*E-LIBRARY*) DAN PENYEDIAAN AKSES INTERNET GRATIS BAGI PARA PEMUSTAKA YANG BERKUNJUNG KE GEDUNG PERPUSTAKAAN DAERAH?
- ❖ DINAS PERPUSTAKAAN AGAR DAPAT MENGOPTIMALKAN MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA PERPUSTAKAAN SEKOLAH MAUPUN PERPUSTAKAAN *KUTE*/DESA AGAR DAPAT MENGELOLA KOLEKSI BUKU SERTA MANAJEMEN PERPUSTAKAAN SECARA MANDIRI DAN BERKELANJUTAN?
- ❖ TERKAIT FUNGSI KEARSIPAN, KAMI MEMINTA SAUDARA BUPATI UNTUK MENGALOKASIKAN ANGGARAN YANG OPTIMAL DALAM PENDATAAN, PENYELAMATAN, DAN DIGITALISASI DOKUMEN-DOKUMEN PENTING DAERAH SERTA MANUSKRIP/SEJARAH BUDAYA ACEH TENGGARA AGAR TERSIMPAN SECARA AMAN, RAPI, DAN MUDAH DIAKSES OLEH GENERASI MENDATANG?

5. PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- KAMI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) MEMINTA PENJELASAN SECARA RINCI MENGENAI PERSENTASE CAPAIAN TARGET PAD TA 2025 SECARA KESELURUHAN, BAIK DARI SEKTOR PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, MAUPUN LAIN-LAIN PAD YANG SAH. SEKTOR MANA YANG MEMENUHI/MELAMPAUI TARGET, DAN SEKTOR APA SAJA YANG TIDAK MENCAPAI TARGET SERTA APA KENDALA UTAMANYA?
- SEJAUH MANA BPKAD TELAH MELAKUKAN PEMETAAN (*MAPPING*) TERHADAP POTENSI PENERIMAAN BARU DAN PENDATAAN ULANG OBJEK PAJAK/RETRIBUSI DI ACEH TENGGARA? FRAKSI KAMI MENILAI MASIH BANYAK POTENSI LOKAL (SEPERTI SEKTOR GALIAN C, RETRIBUSI PASAR, PBG/IMB (PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG/IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN) HINGGA PAJAK RESTORAN/HOTEL) YANG BELUM TERGARAP SECARA MAKSIMAL.
- SEJAUH MANA EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) ATAU SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI (QRIS/E-RETRIBUSI) PADA TA 2025 DALAM

- MEMINIMALISIR KEBOCORAN (*LEAKAGE*) PENERIMAAN KAS DAERAH DAN MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMUNGUTAN DI LAPANGAN?
- ASET DAERAH YANG MENGANGGUR ATAU BELUM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL MERUPAKAN POTENSI PENERIMAAN YANG TERBUANG. BAGAIMANA STRATEGI DAN REALISASI KONTRIBUTSI PEMANFAATAN ASET MILIK PEMKAB (SEPERTI RUKO, LAHAN, ATAU BANGUNAN DAERAH) TERHADAP PENYERTAAN MODAL DAN KONTRIBUTSI KE PAD PADA TA 2025
 - SELAIN MASALAH PENERIMAAN, KAMI MEMINTA PENJELASAN DPKAD MENGENAI BESARAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TA 2025 DAN SEJAUH MANA MANAJEMEN ARUS KAS (*CASH MANAGEMENT*) DILAKUKAN AGAR TIDAK TERJADI KERAWANAN LIKUIDITAS DALAM PEMBAYARAN KEWAJIBAN DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA MAUPUN PENYALURAN HAK-HAK ASN/TENAGA HONORER.

PIMPINAN SIDANG DAN ANGGOTA DEWAN YANG MULIA,

6. TERHADAP DINAS SYARIAT ISLAM

1. KAMI MELIHAT DAN MENCERMATI MINIMNYA ANGGARAN TA 2025 DALAM PROGRAM DAKWAH, PEMBINAAN AQIDAH, DAN PERBAIKAN MORAL/AKHLAK MASYARAKAT, KHUSUSNYA DALAM MEMBENTENGI GENERASI MUDA ACEH TENGGARA DARI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA, JUDI ONLINE, DAN PELANGGARAN SYARIAT ISLAM LAINNYA, UNTUK HAL INI KAMI MEMINTA AGAR LEBIH MENGOPTIMALKAN ANGGARANNYA, KARENA SYARIAT ISLAM MERUPAKAN SALAH SATU KEKHUSUSAN ACEH YANG TERTUANG DALAM UNDANG – UNDANG **NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA)**. KEKHUSUSAN TERSEBUT MERUPAKAN BENTUK PENGAKUAN TERHADAP SEJARAH, ADAT, BUDAYA, DAN ASPIRASI MASYARAKAT ACEH.
2. PENEGAKAN HUKUM SYARIAT ISLAM MEMBUTUHKAN SARANA DAN PENDUKUNG YANG MEMADAI. MINIMNYA ANGGARAN TA 2025 TERHADAP OPERASIONAL WILAYATUL HISBAH (WH) DALAM MELAKUKAN SOSIALISASI, PENCEGAHAN, MAUPUN PENINDAKAN PELANGGARAN QANUN JINAYAT DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA SEHINGGA PELANGGARAN SYARIAT MAKIN MENINGKAT, DALAM HAL INI KAMI MINTA KEPADA SAUDARA BUPATI AGAR DAPAT MEMPERIRITASKAN ANGGARAN TERHADAP PENEGAKAN SYARIAT ISLAM SECARA KAFFAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG KITA CINTAI INI.
3. TERKAIT DENGAN PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) DAN PERSIAPAN/PELAKSANAAN AJANG MTQ, KAMI MEMINTA PENJELASAN SAUDARA BUPATI, MINIMNYA ALOKASI ANGGARAN TA 2025 DALAM MEMBINA QARI-QARIAH, HAFIZH-HAFIZHAH LOKAL ASAL ACEH TENGGARA AGAR MAMPU BERSAING DI TINGKAT PROVINSI MAUPUN NASIONAL. DALAM HAL INI KAMI MEMINTAH PEMERINTAH DAERAH AGAR MEMBERIKAN PERHATIAN YANG LEBIH SERIUS TERHADAP KEBERLANJUTAN PEMBINAAN LPTQ DAN PELAKSANAAN MTQ DENGAN MENGUPAYAKAN DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH. TIDAK TERSEDINYA ANGGARAN PEMBINAAN LPTQ PADA TAHUN ANGGARAN 2026 DIHARAPKAN TIDAK MENAKIBATKAN TERHENTINYA PROSES PEMBINAAN DAN PERSIAPAN PESERTA MTQ. UNTUK ITU, PEMERINTAH DAERAH DIMINTA MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KEBUTUHAN ANGGARAN DIMAKSUD DAN MENGUPAYAKAN PENGALOKASIANNYA MELALUI MEKANISME PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026, SEPANJANG MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEMAMPUAN FISKAL DAERAH.
4. SEJAUH MANA DINAS SYARIAT ISLAM TELAH MEMBANGUN KOLABORASI DAN SINERGI PROGRAM DENGAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA), MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU), SERTA PESANTREN/DAYAH YANG ADA DI ACEH TENGGARA AGAR

7. TERHADAP DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

1. PENANGANAN STUNTING MERUPAKAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH. MOHON PENJELASAN KONKRET TERKAIT CAPAIAN PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING DI ACEH TENGGARA PADA TA 2025. SEJAUH MANA EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN DPPKB DALAM MENDORONG KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN AKSI INTERVENSI SERENTAK DI TINGKAT DESA/KUTE
2. KADER KB DAN TPK DI LAPANGAN ADALAH UJUNG TOMBAK PELAYANAN MASYARAKAT. MOHON PENJELASAN MENGENAI KEPASTIAN, KELANCARAN, DAN KETERBUKAAN DALAM PENYALURAN BIAYA OPERASIONAL/INSENTIF BAGI PARA KADER TPK DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) DI SELURUH KECAMATAN SELAMA TA 2025.
3. BAGAIMANA EVALUASI KEAKTIFAN PROGRAM KAMPUNG KB YANG TELAH DIBENTUK DI BERBAGAI KUTE DI ACEH TENGGARA PADA TA 2025? SEJAUH MANA KAMPUNG KB INI BENAR-BENAR HIDUP MENJADI WADAH INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI KELUARGA, BUKAN SEKADAR PLANG NAMA SEREMONIAL?

8. TERHADAP DINAS PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAH RAGA (DISPARPORA

1. BAGAIMANA STRATEGI PROMOSI PARIWISATA YANG DILAKUKAN DISPARPORA MAMPU MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN LOKAL MAUPUN MANCANEGARA SERTA BERKONTRIBUTSI NYATA PADA PENERIMAAN PAD DAN UMKM MASYARAKAT SETEMPAT PASCA BENCANA BANJIR BANDANG
2. MINGINGAT DAERAH KITA MENERAPKAN SYARIAT ISLAM DAN MENJUNJUNG TINGGI KEARIFAN LOKAL, KAMI MINTA KEPADA DISPARPORA MEMASTIKAN BAHWA TATA KELOLA OBJEK WISATA DI ACEH TENGGARA TETAP BERJALAN SESUAI DENGAN NORMA KEAGAMAAN DAN ATURAN SYARIAT ISLAM TANPA MENGURANGI KENYAMANAN PARA PENGUNJUNG
3. PEMUDA ADALAH PILAR MASA DEPAN DAERAH. MOHON PENJELASAN MENGENAI ALOKASI DAN REALISASI PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN, WIRAUSAHA MUDA, SERTA DUKUNGAN

HIBAH/BANTUAN OPERASIONAL BAGI WADAH KEPEMUDAAN (SEPERTI KNPI DAN OKP/KARANG TARUNA) PADA TA 2025. SEJAUH MANA PROGRAM-PROGRAM INI MAMPU MERANGKUL PEMUDA AGAR TERHINDAR DARI BAHAYA NARKOBA DAN KEGIATAN NEGATIF LAINNYA?

4. BAGAIMANA EVALUASI PENGGUNAAN ANGGARAN TA 2025 DALAM PEMBINAAN CABANG-CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI ACEH TENGGARA? SEJAUH MANA EFEKTIVITAS DANA HIBAH KEOLAHRAAGAN (KONI) DALAM MEMPERSIAPKAN ATLET-ATLET LOKAL UNTUK AJANG KEJURDA MAUPUN PORA, SERTA BAGAIMANA BENTUK PERHATIAN PEMKAB TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN BONUS BAGI ATLET/PELATIH BERPRESTASI?

KETUA, WAKIL KETUA, REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN ,SAUDARA BUPATI SERTA HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

9. TERHADAP SEKRETARIAT PEMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

1. KADERISASI ULAMA MUDA MERUPAKAN INVESTASI JANGKA PANJANG BAGI KEBERLANJUTAN DAKWAH DI ACEH TENGGARA. KAMI MEMINTA PEMERINTAH DAERAH AGAR DAPAT MENGOPTIMALKAN ANGGARANNYA UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN KADER ULAMA (PKU) SERTA AGAR DAPAT MEMFASILITASI SEKRETARIAT MPU UNTUK MELAKUKAN SINERGI ANTARA MPU DENGAN LEMBAGA DAYAH/PESANTREN DI DAERAH KITA.
2. FATWA DAN TAUSIYAH MPU SANGAT DIBUTUHKAN MASYARAKAT SEBAGAI BENTENG MORAL MENGHADAPI MARAKNYA JUDI ONLINE, BAHAYA NARKOBA, DAN DEKADENSI MORAL REMAJA. KAMI MEMINTA KEPADA SAUDARA BUPATI AGAR DAPAT MEMBERIKAN DUKUNGAN ANGGARAN DALAM MEMFASILITASI SOSIALISASI PRODUK-PRODUK FATWA MPU HINGGA KE TINGKAT KUTE/DESA DAN SEKOLAH-SEKOLAH
3. KAMI MINTA KEPADA SEKRETARIAT MPU AGAR DAPAT MEMFASILITASI DIALOG KEAGAMAAN, PENCEGAHAN PAHAM MENYIMPANG, SERTA PENJAGAAN KERUKUNAN ANTARUMAT MAUPUN INTERN UMAT BERAGAMA DI WILAYAH ACEH TENGGARA YANG MAJEMUK DENGAN TENTUNYA DUKUNGAN ANGGARAN YANG OPTIMAL UNTUK INI KEPADA SAUDARA BUPATI AGAR DAPAT MEMPERIRITASKAN ANGGARANNYA

10. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB ACEH TENGGARA

1. TERHADAP PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN UNTUK TEMPAT IBADAH (MASJID, MEUNASAH, GEREJA), RUMAH IBADAH, DAYAH, PESANTREN, SERTA ORGANISASI KEAGAMAAN DI ACEH TENGGARA? FRAKSI KAMI MENEKANKAN PENTINGNYA PEMERATAAN AGAR BANTUAN TIDAK BERFOKUS DI WILAYAH TERTENTU SAJA, MELAINKAN MENJANGKAU HINGGA KE KUTE/DESA TERPENCIL.
2. MOHON PENJELASAN MENGENAI EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TA 2025 DALAM MEMFASILITASI PELEPASAN, PEMULANGAN, DAN OPERASIONAL JEMAAH CALON HAJI (JCH) ASAL KABUPATEN ACEH TENGGARA. SEJAUH MANA BAGIAN KESRA TELAH MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SARANA TRANSPORTASI DAN PENDAMPINGAN BAGI PARA JEMAAH HAJI DAERAH KITA?
3. UNTUK PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM DAN KEGIATAN SYIAR KEAGAMAAN DAERAH, SEJAUH MANA BAGIAN KESRA MERANGKUL SELURUH ELEMEN LEMBAGA KEAGAMAAN DAN ORMAS ISLAM UNTUK MEMPERKUAT SILATURAHMI SERTA UKHUWAH DI BUMI SEPAKAT SEGENEP

11. TERHADAP SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH ACEH TENGGARA

KETIDAKHADIRAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH TENGGARA, KAMI MINTA KEPADA SAUDARA BUPATI AGAR DAPAT MENGEVALUASI SECARA MENYELURUH, **KAMI JUGA MEMINTA KEPADA BUPATI AGAR DAPAT MEMBERIKAN SANGSI KEPADA KEPALA SEKRETARIAT MAA ATAS KETIDAKHADIRAN DALAM AGENDA RESMI PEMBAHASAN LPP APBK TAHUN 2025 DENGAN ALASAN “TIDAK SEMPAT” , INI ARTINYA DAPAT MENJADI INDIKASI KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERINTAH KEDINASAN**

12. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. SAHUDIN

FRAKSI PAN MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA, KHUSUSNYA MANAJEMEN DAN SELURUH TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) H. SAHUDIN, ATAS BERBAGAI UPAYA DAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT SELAMA TAHUN ANGGARAN 2025. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, BAIK DARI ASPEK PELAYANAN MEDIS, KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN, SARANA DAN PRASARANA, MAUPUN RESPONS TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT, MERUPAKAN LANGKAH POSITIF YANG PATUT DIAPRESIASI. HAL INI MENUNJUKKAN ADANYA KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DAN JAJARAN RSUD H. SAHUDIN UNTUK TERUS MEMPERBAIKI MUTU PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT ACEH TENGGARA. FRAKSI PAN BERHARAP CAPAIAN DAN BERBAGAI PERBAIKAN TERSEBUT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN TERUS DITINGKATKAN SECARA BERKELANJUTAN. PELAYANAN YANG CEPAT, RAMAH, PROFESIONAL, TRANSPARAN, SERTA MENGUTAMAKAN KESELAMATAN DAN KEPUASAN PASIEN HENDAKNYA MENJADI STANDAR UTAMA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

FRAKSI PAN JUGA MENDORONG AGAR PENINGKATAN PELAYANAN TERSEBUT DIIKUTI DENGAN PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA, PEMANFAATAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL, SERTA PEMERATAAN AKSES PELAYANAN BAGI SELURUH MASYARAKAT, TERMASUK MASYARAKAT DARI WILAYAH TERPENCIL.

DENGAN DEMIKIAN, RSUD H. SAHUDIN DIHARAPKAN SEMAKIN MAMPU MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS, TERJANGKAU, DAN DAPAT DIANDALKAN OLEH SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.

13. DISIPLIN ASN, P3K , DAN P3K PW

FRAKSI PAN MEMBERIKAN PERHATIAN TERHADAP KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK), SERTA PPPK PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA. DISIPLIN APARATUR MERUPAKAN SALAH SATU FAKTOR PENTING DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS, SERTA PENINGKATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH.

FRAKSI PAN MENGAPRESIASI PARA ASN, PPPK, DAN PPPK PARUH WAKTU YANG TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB. NAMUN DEMIKIAN, MASIH DIPERLUKAN PENGUATAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN AGAR KEDISIPLINAN APARATUR DAPAT DITERAPKAN SECARA KONSISTEN PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH.

- FRAKSI PAN MEMINTA PEMERINTAH DAERAH MEMASTIKAN PENERAPAN DISIPLIN DILAKUKAN SECARA ADIL, OBJEKTIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF. KEHADIRAN, KETEPATAN WAKTU, PELAKSANAAN TUGAS, KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN KEDINASAN, SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT HARUS MENJADI BAGIAN PENTING DALAM EVALUASI KINERJA SETIAP APARATUR.
- KHUSUS TERHADAP PPPK DAN PPPK PARUH WAKTU, FRAKSI PAN BERHARAP PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN KEJELASAN MENGENAI TUGAS, TANGGUNG JAWAB, TARGET KINERJA, JAM KERJA, SERTA MEKANISME PEMBINAAN DAN EVALUASINYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. JANGAN SAMPAI PERBEDAAN STATUS KEPEGAWAIAN MENIMBULKAN KETIDAKJELASAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS MAUPUN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
- FRAKSI PAN JUGA MENDORONG AGAR PENERAPAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR YANG BERPRESTASI DAN PEMBERIAN PEMBINAAN MAUPUN SANKSI TERHADAP APARATUR YANG MELANGGAR DISIPLIN DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU. DENGAN DEMIKIAN, TERCIPTA BUDAYA KERJA YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, BERTANGGUNG JAWAB, DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT.

PADA AKHIRNYA, FRAKSI PAN BERHARAP SELURUH ASN, PPPK, DAN PPPK PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DAPAT MENINGKATKAN DISIPLIN DAN ETOS KERJA SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL SERTA MENDUKUNG TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN , BUPATI DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

TERTAKHIR FRAKSI PAN MEMANDANG BAHWA HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF MERUPAKAN SALAH SATU KUNCI KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (SAAT INI KAMI MENILAI ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF TIDAK SEDANG BAIK-BAIK SAJA). DPRK DAN PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI KEDUDUKAN DAN FUNGSI MASING-MASING, NAMUN KEDUANYA HARUS BERJALAN SECARA SINERGIS, SALING MENGHORMATI, SERTA MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DI ATAS KEPENTINGAN LAINNYA.

FRAKSI PAN MENYAYANGKAN APABILA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN MASIH TERDAPAT KOMUNIKASI DAN KOORDINASI YANG BELUM BERJALAN SECARA OPTIMAL ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF. KONDISI TERSEBUT APABILA DIBIARKAN DAPAT MENGHAMBAT PROSES PEMBAHASAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN, SERTA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

OLEH KARENA ITU, FRAKSI PAN MENDORONG BUPATI BESERTA JAJARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRK UNTUK MEMBANGUN KEMBALI KOMUNIKASI YANG LEBIH TERBUKA, KONSTRUKTIF, DAN SALING MENGHARGAI. PERBEDAAN PANDANGAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMERINTAHAN MERUPAKAN HAL YANG WAJAR DAN SEHARUSNYA MENJADI BAGIAN DARI PROSES DEMOKRASI, BUKAN MENJADI PENGHAMBAT DALAM MEWUJUDKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT.

FRAKSI PAN BERHARAP SETIAP PERBEDAAN DAPAT DISELESAIKAN MELALUI DIALOG, MUSYAWARAH, DAN MEKANISME KELEMBAGAAN YANG BERLAKU. PEMERINTAH DAERAH HENDAKNYA LEBIH RESPONSIF TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DAN ASPIRASI DPRK, SEMENTARA DPRK AKAN TETAP MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN, DAN PENGAWASAN SECARA OBJEKTIF DAN KONSTRUKTIF.

FRAKSI PAN MENEGASKAN BAHWA YANG HARUS MENJADI PRIORITAS BERSAMA BUKANLAH KEPENTINGAN LEMBAGA MAUPUN KELOMPOK, MELAINKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA. UNTUK ITU, KAMI MENGAJAK SELURUH UNSUR LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF UNTUK MEMPERKUAT SINERGI, MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG SEHAT, DAN MENGESAMPINGKAN PERBEDAAN YANG TIDAK PRODUKTIF DEMI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT.

DEMIKIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. BERBAGAI CATATAN, SARAN, MASUKAN, DAN REKOMENDASI YANG TELAH DISAMPAIKAN MERUPAKAN BENTUK TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL FRAKSI DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SERTA

SEBAGAI WUJUD KOMITMEN UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF, DAN BERPIHAK PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT.

FRAKSI PAN BERHARAP SELURUH CATATAN DAN REKOMENDASI TERSEBUT DAPAT MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH DAERAH UNTUK DILAKUKAN EVALUASI DAN DITINDAKLANJUTI DALAM RANGKA MEMPERBAIKI KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PADA MASA YANG AKAN DATANG.

AKHIRNYA, FRAKSI PAN MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH KEPADA SELURUH PIHAK YANG TELAH BERKONTRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SELAMA TAHUN ANGGARAN 2025. SEMOGA SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRK SENANTIASA TERJALIN DENGAN BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, DAN MEMBERIKAN MANFAAT SEBESAR-BESARNYA BAGI MASYARAKAT.

DEMIKIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI INI KAMI SAMPAIKAN. ATAS PERHATIAN DAN KERJA SAMA SEMUA PIHAK, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

KE PASAR PAGI MEMBELI KETUPAT,
SINGGAH SEBENTAR MEMBELI JAMU.
KRITIK DAN SARAN TELAH KAMI SAMPAIKAN DENGAN TEPAT,
DEMI PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK UNTUK MASYARAKAT MAJU.

KELAWE PASARAN MEMBAWA TALAM,
SINGGAH SEBENTAR DI PEDESI.
SEMOGA LPP MENJADI BAHAN EVALUASI YANG MENDALAM,
UNTUK MEMBANGUN DAERAH YANG LEBIH BAIK DI MASA NANTI.

BILLAHITAUFIQ WAL-HIDAYAH. WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
KUTACANE, 27 AGUSTUS 2026

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRK ACEH TENGGARA**

NO	NAMA	JABATA	TANDA TANGAN
1	ANUGRAH RIZKY PUTRA, ST	KETUA	1dto.....
2	H.MARWAN HUSNI, S.Sos.I	WAKIL KETUA	2dto.....
3	SAHIDIN BASRI	SEKRETARIS	3dto.....
4	MARSIDIN SITEPU	ANGGOTA	4dto.....
5	GERLAM	ANGGOTA	5dto.....
6	GEGOH MUSTAWA MADYA	ANGGOTA	6dto.....

TERIMA KASIH KEPADA **FRAKSI PAN** YANG TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA, UNTUK SELANJUTNYA KAMI PERSILAKAN KEPADA **FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA** UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA. -----

III. PANDANGAN UMUM FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA :

ASSALAMU ‘ALAIKUM W.W
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
MERDEKA.....!

- **YTH** : SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- **YTH** : SAUDARA BUPATI DAN WKIL BUPATI ACEH TENGGARA
- **YTH** : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA, PARA ASISTEN BUPATI, STAF AHLI BUPATI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE-KABUPATEN ACEH TENGGARA.
- **YTH** : SAUDARA SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA,
- **YTH** : SAUDARA PIMPINAN ORGANISASI POLITIK, PROFESI, PEMUDA, LSM, SERTA REKAN-REKAN INSAN PERS DAN PARA UNDANGAN HADIRIN HADIRAT YANG KAMI MULIAKAN.

MENGAWALI PANDANGAN UMUM INI KAMI MENGAJAK KITA SEMUA MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT **ALLAH SWT** TUHAN YANG MAHA ESA, YANG MANA ATAS RAHMAT DAN HIDAYAHNYA PADA SIANG YANG SANGAT BERBAHAGIA INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA SIDANG KE - III (TIGA) TAHUN 2026 DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI. (DPRK ACEH TENGGARA) TERKAIT DENGAN RANCANGAN QANUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 SEBAGAIMANA YANG KAMI SAMPAIKAN DI ATAS.

YANG SE AKIDAH DENGAN KAMI, TAK LUPUT-LUPUTNYA SHOLAWAT BESERTA SALAM KITA BERIKAN KEPADA BAGINDA NABI BESAR MUHAMMAD SAW SEMOGA KITA SEMUA MENDAPAT SAFAATNYA YAUMIL MA'SAR KELAK, AMIN YA RABBAL 'ALAMIN

SEBELUM MEMASUKI PANDANGAN UMUM FRAKSI INI, PERKENANKAN KAMI TERLEBIH DAHULU MENGUCAPKANKAN :

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PIMPINAN RAPAT, ATAS RUANG WAKTU DAN KESEMPATAN YANG DI BERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI KAMI,

UCAPAN TERIMA KASIH JUGA, KAMI SAMPAIKAN KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DAERAH ACEH TENGGARA YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA KEUANGAN TERHADAP RAQAN (RANCANGAN QANUN) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025 SEBAGAIMANA YANG SEDANG KITA PARIPURNAKAN BERSAMA PADA SAAT SEKARANG INI.

RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,

SERTA HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA MENGHAPAPKAN BAHWA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA BUKAN SEKEDAR HANYA MEMENUHI KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL SAJA MELAINKAN MOMENTUM INI PENTING UNTUK MENG EVALUASI SEJAUH MANA APBK BENAR-BENAR MEMBERIKAN MAMFAAT YANG NYATA BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA JUGA MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG KEMBALI MERAH OPINI WAJAR TAMPA PENGECUALIAN ATAU **(WTP)** DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERWAKILAN ACEH SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN BERTURUT-TURUT. PRESTASI YANG DI RAIH INI MENUNJUKAN ADANYA KOMITMEN TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG SEMAKIN MEMBAIK, NAMUNPUN DEMIKIAN OPINI WTP INI BUKANLAH TUJUAN AKHIR MELAINKAN PONDASI AWAL UNTUK MEMGHADIRKAN PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN BERKWALITAS EFEKTIF DAN BERDAMPAK LANGSUNG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA MEMANDANG PERLU BAHWA OPTIMALISASI PAD HARUS DILAKUKAN MELALUI PENGUTAN SISTEM DIGITAL PERPAJAKAN DAERAH, PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PERLUASAN BASIS PAJAK, SERTA PENGELOLAAN ASET DAERAH YANG LEBIH PRODUKTIF TAMPA MEMBEBANI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA.

DALAM KESEMPATAN INI FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA MENYAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DIANTARANYA SEBAGAI MANA BERIKUT INI

1. SAUDARA BUPATI DALAM HAL INI DI WAKILKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH KIRANYA PERLU MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANANAAN ANGGARAN AGAR TARGET PENDAPATAN MAUPUN BELANJA LEBIH REALISTIS DAN DAPAT DI CAPAI SECARA OPTIMAL.
2. KAMI JUGA SANGAT BERHARAP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA KIRANYA TERUS DAPAT MEMPERKUAT STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI DIGITALISASI PERPAJAKAN, OPTIMALISASI ASET DAERAH DAN PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG ADA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.
3. SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH KIRANYA TERUS DAPAT MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BELANJA MODAL AGAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAPAT SELESAI TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN, TEPAT GUNA DAN MEMBERIKAN MAMFAAT LANGSUNG SEHINGGA DAPAT DI RASAKAN OLEH MASYARAKAT DI BUMI METUAH YANG SAMA-SAMA KITA CINTAI INI.
4. SEBAGAI PIHAK EKSEKUTIF PEMERINTAH DAERAH HENDAKLAH MELAKUKAN EVALUASI YANG MENYELURUH TERHADAP RENDAHNYA PELAYANAN PUBLIK DARI **ASN** APARATUR SIPIL NEGARA MULAI DARI PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI SEPERTI PENERBITAN KTP DAN DAN KARTU KELUARGA MASIH MEMERLUKAN WAKTU YANG MENGURAS ENERGI DALAM KEPENGURUSANNYA.
5. SEBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN YANG SEDANG DI JALANKAN KAMI FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA MENINGGATKAN DAN MEMINTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA KINYANYA DAPAT MEMASTIKAN SETIAP RUPIAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN HARUS MAMPU MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP EFESIENSI TRANSPARANSI, AKUNTABLE DAN BERKEADILAN.
6. FRAKSI HANURA PERJUNGAN BANGSA BERHARAP AGAR SEMUA CATATAN-CATATAN DARI **BPK RI** YANG MASIH TERSISA DAN BELUM DI SELESAIKAN KIRANYA SEGERA UNTUK DI TINDAKLANJUTI SECARA TUNTAS SEHINGGA KUALITAS TATA KELOLA KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA SEMAKIN BAIK PADA TAHUN-TAHUN YANG AKAN DATANG.

**SAUDARA KETUA WAKIL KETUA,
SAUDARA SEKDA,
DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YNG BERBAHAGIA...**

- 7. KECAMATAN BABUL MAKMUR MERUPAKAN KECAMATAN PERBATASAN DENGAN KABUPATEN KARO, SEHINGGA KAMI MEMANDANG PERLU UNTUK DILAKUKAN PEMBANGUNAN PAGAR KECAMATAN BABUL MAKMUR, AGAR KESAN BAIK DAPAT TERCERMIN BAGI SIAPAPUN SAAT MEMASUKI KABUPATEN ACEH TENGGARA
- 8. KAMI JUGA MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH, DALAM HAL INI SAUDARA BUPATI AGAR DAPAT MEMPERBAIKI JALAN ANTARA DESA KEBUN SERE MENUJU LAPANGAN TERBANG ALAS LEUSER ANTARA DI KECAMATAN SEMADAM, SEHINGGA DAPAT MEMPERMUDAH AKSES MENUJU LAPANGAN TERBANG YANG KITA BANGGAKAN DI ACEH TENGGARA INI,
- 9. BERJALANNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK PASTINYA TIDAK TERLEPAS DARI HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA PIHAK EKSEKUTIF DAN LEGESLATIF MAKA KAMI FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA MEMANDANG PERLU KIRANYA PIHAK PEMANGKU KEPENTINGAN DAPAT MENGAMBIL LANGKAH YANG SOLUKTIF DI SEMUA TINGKATAN AGAR JANGAN ADA ISSU MIRING DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT BAHWA KEADAAN SAAT INI SEDANG TIDAK BAIK SAJA TIDAK BENAR ADANYA. NAMUN DALAM SITUASI KEADAAN TERKENDALI SEBAGAIMANA MENJADI HARAPAN KITA BERSAMA-SAMA.

TERKAIT DENGAN PERUBAHAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA PERIODE 2024-2025 KAMI FRAKSI HANURA PERJUNGAN BANGSA MENYATAKAN SUDAH SEPATUTNYA DAN SEPANTASNYA PERUBAHAN ITU ADALAH LAJIM DAN TENTUNYA HARUS SESUAI DENGAN DASAR HUKUM SERTA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SEDANG BERLAKU AGAR PERUBAHAN TATIB INI MENGARAH KEPADA YANG LEBIH BAIK LAGI.

FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA JUGA MEMANDANG **(AKD)** ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG DI USULKAN DARI FRAKSI-FRAKSI UNTUK DI SYAHKAN DI PARIPURNA INI KIRANYA MENJUNJUNG TINGGI PROPESSIONALITAS DAN MENGACU PADA TATIB YANG SEDANG BERLAKU, DAN TELAH KITA SEPAKATI DI SETIAP FRAKSI YANG ADA. HENDAKNYA SESUAI DENGAN PERSONNYA MASING MASING DENGAN TIDAK MEMENTINGKAN EGO DARI GOLONGAN TETENTU SAJA NAMUN MENGUTAMAKAN KEADILAN, KESELARASAN DAN KESESUIAAN DAN KEPATUTAN TENTUNYA.

AKHIRANYA FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA BERHARAP SELURUH URAIAN REKOMENDASI YANG KAMI SAMPAIKAN DAPAT MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH ACEH TENGGARA DALAM MEMPROSES PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBK TAHUN 2025 SEHINGGA DAPAT MENGHASILKAN KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI SEBESAR-BESARNYA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA.

DEMIKIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA INI KAMI SAMPAIKANKAN DAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERSAMAAN PANDANGAN DALAM MENATA DAN MEMBANGUN NEGERI YANG METUAH INI, ATAS SENERGI SERTA PARTISIPASINYA DI SEMUA PIHAK KAMI UCAPKAN BANYAK-BANYAK TERIMA KASIH

MOHON MAAF APABILA ADA TINDAKAN, UCAPAN DAN KATA-KATA YANG KURANG BERKENAN, MUDAH-MUDAHAN DI SETIAP NIAT DAN LANGKAH YANG BAIK, AKAN MENDAPAT PETUNJUK DARI-NYA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA DAN MAHA BIJAKSANA.

AMIN YA RABBAL ‘ALAMIN

ANGIN TIMUR MUNCUL DI AWAL

PERTANDA SUANA SEJUK MULAI DATANG

AMANAH ANGGARAN TERUS AKAN KAMI KAWAL

UNTUK MASYARAKAT ACEH TENGGARA TERSAYANG

KUTACANE, 27 AGUSTUS 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA

NO	NAMA	JABATA	TANDA TANGAN
1	ROY HENDRA PURNOMO, SE	KETUA	1dto.....
2	M. MUFTY DESKY	WAKIL KETUA	2dto.....
3	TIMBUL HASUDUNGAN	SEKRETARIS	3dto.....
4	MUSYADI, SPd	ANGGOTA	4dto.....
5	MANUMPAK	ANGGOTA	5dto.....

TERIMA KASIH KEPADA **FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA** YANG TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA, UNTUK KESEMPATAN YANG TERAKHIR KAMI PERSILAKAN KEPADA **FRAKSI SELAYAKH** UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA. -----

IV. PANDANGAN UMUM FRAKSI SELAYAKH :

**ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.**

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR ATAS KEHADIRAD ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA TUHAN YANG MAHA ESA, BERKAT LIMPAHAN RAHMAT SERTA NIKMATNYA, SEHINGGA KITA SEMUA MASIH DAPAT BERKUMPUL DI TEMPAT YANG MULIA INI DALAM KEADAAN SEHAT DAN SEJAHTERA.

YANG SEAKIDAH DENGAN KAMI MARILAH SENANTIASA KITA BERSHALAWAT KEPADA JUNJUNGAN ALAM YAKNI NABI BESAR MUHAMMAD SAW, KARENA BELIAULAH KITA DAPAT MENGENAL MANA YANG BENAR DAN MANA YANG SALAH.

- ❖ YTH. SAUDARA KETUA , PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
- ❖ YSH.SAUDARA BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA/YANG MEWAKILI
- ❖ YSH. SAUDARA SEKDA, PARA ASISTEN / STAF AHLI / KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
- ❖ YSH. PARA UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

MENGAWALI PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM INI, IZINKAN KAMI DARI FRAKSI SELAYAKH MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMAKASIH :

YANG PERTAMA KEPADA PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRK KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG BERKENAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI SELAYAKH TENTANG : **RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027, NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA T.A. 2026, DAN PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029 SERTA PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

RAPAT PARIPURNA DPRK YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SETELAH KAMI MEMBAHAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025 YANG DILAKUKAN MELALUI EKSPOSE BERSAMA KOMISI MASING-MASING DENGAN MITRA KERJA ATAUPUN DINAS YANG BERSANGKUTAN.

TENTUNYA DALAM HAL PEMBAHASAN TERSEBUT DILAKUKAN SECARA MATANG DAN MAKSIMAL DAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB NAMUN WALAUPUN DEMIKIAN KAMI DARI FRAKSI SELAYAKH INGIN MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL DAN INI JUGA HANYALAH UNTUK KEPENTINGAN KITA BERSAMA DAN UNTUK MENJADIKAN ACEH TENGGARA YANG HEBAT.

1. DI DALAM PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025 TENTUNYA SUDAH LAH DI REALISASI SESUAI DENGAN PERIORITAS DAN KEBTUHANNYA. AKAN TETEPI TERLAKSANANYA DAN TEREALISASI ANGGARAN TERSEBUT TIDAK LAH TERLEPAS DARI PENGAWASAN DAN PELAPORAN, DALAM KESEMPATAN INI KAMI INGIN MENYAMPAIKAN BAHWA ANGGARAN TAHUN 2025 KITA PEROLEH DARI BERBAGAI SUMBE, SEPERTI PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAINNYA YANG SAH.
2. UNTUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN TAHUN 2025 TENTUNYA MELALUI DINAS-DINAS TERKAIT DAN SETELAH KAMI MELAKUKAN EKPOSE MELALUI KOMISI MASING-MASING ADA BEBERPA HAL YANG PERLU KAMI SAMPAIKAN DAN MEMANG INI HARUS KAMI SAMPAIKAN AGAR SUPAYA BISA MENJADI MOTIPASI KITA UNTUK KEDEPANNYA.
3. KAMI FRAKSI SELAYAKH INGIN SAUDARA BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA, UNTUK MENGEVALUASI KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA KARENA SELAMA INI KAMI MELIHAT MASIH BANYAK YANG TIDAK BENAR DALAM PROSES PENGELOLAAN DI DALAM NYA.. MAKA KAMI INGIN KETEGASAN KEPADA SAUDARA BUPATI UNTUK MENINDAKNYA AGAR SUPAYA ADA EFEK JERA DAN KALAU BISA DI AUDIT KEMBALI AJA SUPAYA KITA BISA MELIHAT KEBENARANNYA.
4. KAMI FRAKSI SELAYAKH MENGHIMBAU KEPADA SAUDARA BUPATI, AGAR MENGEVALUASI KINERJA PDAM KARENA SECARA UMUM KITA BISA MELIHAT APA YANG DILAKUKAN PDAM SELAMA INI, KALAU BISA DI AUDIT LAGI ITU ANGGARAN PDAM TAHUN ANGGARAN 2025 .
5. KAMI JUGA FRAKSI SELAYAKH MEMINTA KEPADA SAUDARA BUPATI AGAR MENGEVALUASI KINERJA BAGIAN EKONOMI SETDAKAB KALAU BISA INI DI AUDIT JUGA ANGGARAN TAHUN 2025,
6. KAMI FRAKSI SELAYAKH MEMINTA KEPADA SAUDARA BUPATI, UNTUK DAPAT MENJELASKAN TENTANG DANA BAGI HASIL (DBH) SAWIT DARI TAHUN 2023.2024.2025 KEMANA PERUNTUKANNYA, KARENA KAMI

MELIHAT ADA YANG TIDAK COCOK DENGAN YANG DI DAPATKAN DAN DENGAN YANG BAGIKAN KE DINAS-DINAS TERKAIT... KARENA MENURUT PENGETAHUAN KAMI DBH SAWIT TERSEBUT HANYA DI SALURKAN KE DINAS PERTANIAN DAN DINAS PU. SETELKAH KAMI CEK DILAPANGAN KENAPA TIDAK ADA KECOCOKAN ANTARA YANG DIANGGARKAN DENGAN YANG DIREALISASIKAN OLEH DINAS TERKAIT...

- 7. KAMI FRAKSI SELAYAKH MEMANDANG PERLU UNTUK MEMBUAT POS BANTU PENGADUAN MASYARAKAT DI DAERAH LEUSER, PERBATASAN DENGAN KECAMATAN LAU BALENG TANAH KARO, AGAR SUPAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN TERSEBUT MERASAKAN KEHADIRAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DAN TIDAK MERASA TERISOLIR DAN MEREKA TIDAK MERASA TERKUCILKAN.
- 8. KAMI FRAKSI SELAYAKH MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR MEMPERHATIKAN LAHAN PERTANIAN DAN MELAKUKAN PENGKAJIAN HUKUM TETAP DALAM HAL INI QANUN TENTANG LAHAN PERTANIAN AGAR KEDEPANNYA LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TIDAK BERKURANG.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA....

IZIN PIMPINAN, KAMI MENILAI HARI INI HUBUNGAN ANTARA EXECUTIVE & LEGISLATIF TIDAK SEDANG BAIK – BAIK SAJA. TERIMAKASIH PIMPINAN.

DEMIKIANLAH PANDANGAN UMUM DARI FRAKSI SELAYAKH SEMOGA BISA MENJADI DORONGAN UNTUK MEMBANGUN DAERAH KITA INI.

KUTACANE, 27 AGUSTUS 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
FRAKSI SELAYAKH

NO	NAMA	JABATA	TANDA TANGAN
1	M. RAFI SEKEDANG	KETUA	1dto.....
2	ALIYAS	WAKIL KETUA	2dto.....
3	SATRIA ABADI	SEKRETARIS	3dto.....
4	RONAL HOLOMAN	ANGGOTA	4dto.....

HADIRIN PESERTA SIDANG YANG KAMI HORMATI !

TERIMA KASIH KEPADA SEMUA FRAKSI YANG TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA --- UNTUK SELANJUTNYA RAPAT PARIPURNA INI KAMI **SKOR** -- DAN AKAN KITA LANJUTKAN BESOK HARI --- DENGAN AGENDA --- PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ACEH TENGGARA ATAS PANDANGAN UMUM ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA DARI FRAKSI-FRAKSI.

KAMI MENGHARAPKAN KEPADA SAUDARA BUPATI AGAR DAPAT MERESPON PANDANGANGAN UMUM DARI FRAKSI-FRAKSI TADI DENGAN CUKUP TERINCI --- RASIONAL DAN JELAS.

RAPAT KAMI SKOR.

TOK..... (SATU KALI KETUKAN PALU)

KAMI AKHIRI
BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU ‘ALAIKUM WR. WB

KUTACANE, 27 AGUSTUS 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA
KETUA



Dr. DENNY FEBRIAN ROZA, S.STP, M.Si



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA

ديوان فروع اقليم تڠݢارا

Jln. Jend. Ahmad Yani No. Telp. (0629) 522892, 21015, Fax.(0629) – 21015
Kutacane – Aceh Tenggara 24651

= NOTULEN =

1. Acara

: LANJUTAN RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG III TAHUN 2026 TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027, DAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026, PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029 DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029.
- 1 Hari/Tanggal

: JUM'AT, 28 AGUSTUS 2026
2. Jam

: 09..00 – 12.00 WIB Wib.
3. Tempat

: RUANG RAPAT UTAMA DPRK ACEH TENGGARA
4. PimpinanRapat

: KETUA DPRK ACEH TENGGARA (**Dr. DENNY FEBRIAN ROZAS.STP,M.Si**)
5. Sekretaris

: SEKRETARIS DPRK ACEH TENGGRA (**MUHAMMAD HATTA, SE**)
6. Notulen

: HADI FATHUR RAHMI, SE
7. Anggota DPRK Yang Hadir Sesuai Undangan

1. DENNY FEBRIAM ROZA, S.STP, M.Si

2. GEGOH MUSTAWA MADYA

3. H. BUKHARI

4. ARNOLD, SH

5. ROY HENDRA PURNOMO, SE

6. M. RAFI SEKEDANG

7. SAMSUARIADI, ST

8. MARSIDIN SITEPU

9. SATRIA ABADI

10. M. MUFTY DESKY

11. H.MARWAN HUSNI, S.Sos.I

12. ALIYAS

13. MARAWAL HAKIM

14. ABI HASAN, SH

15. MUHARRI KASTURI

16. PUTRI NIKEN JILE

17. INTAN PERMATA SARI

18. MUSLIADI

19. MIRZA AL MAHBUBI, S.T., M.T

20. H. BUSTAMI RAMUD

21. TIMBUL HASUDUNGAN S

22. MANUMPAK

23. GERLAM

24. KAMIRUN MUNTHE
8. Izin/Sesuai dengan Undangan

:

1. ANUGRAH RIZKY PUTRA, ST

2. DIAN REZ PAHLEVI, SH

3. SAHIDIN BASRI, SKM, M.Kes

4. MUSYADI, S.Pd

5. MARUAN HANAFAI

6. RONAL HALOMOAN, S.H
9. Turut Hadir

: SEKDAKAB, DINAS JAWATAN, KABAG DAN PARA UNDANGAN LAINNYA. (DAFTAR HADIR TERLAMPIR).

LAPORAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA OLEH SEKRETARIS DPRK, DARI 30 (TIGA PULUH) ORANG ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA YANG HADIR 24 (DUA PULUH EMPAT) ORANG, IZIN 6 (ENAM) ORANG SESUAI DENGAN TATA TERTIB MAKA JUMLAH YANG HADIR TELAH MEMENUHI QOURUM UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA (*DAFTAR HADIR TERLAMPIR*) -----

PEMBICARAAN TINGKAT I

ASSALAMU' ALAIKUM WR. WB
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

SKOR KAMI CABUT KEMBALI

TOK.... (SATU KALI KETUKAN)

HADIRIN PESERTA SIDANG YANG KAMI HORMATI

BAHWA PADA RAPAT PARIPURNA KEMARIN --- AGENDA KITA ADALAH, PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA DARI FRAKSI-FRAKSI.

KINI SAATNYA KITA BERANJAK KE ACARA SELANJUTNYA --- DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ACEH TENGGARA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI --- KEPADA SAUDARA SEKDA --- KAMI PERSILAKAN DENGAN SEGALA HORMAT.

7. PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ACEH TENGGARA ATAS PENDANGAN UMUM ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA DARI FRAKSI-FRAKSI :

**ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.**

- YTH. SDR. WAKIL KETUA DPRK ACEH TENGGARA,**
- YTH. SDR. PARA KETUA FRAKSI DAN PARA KETUA KOMISI SERTA SELURUH ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA;**
- YSH. SDR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA;**
- YSH. SDR. PARA ASISTEN DAN STAF AHLI;**
- YSH. SDR. PARA KEPALA OPD, PARA KABAG DAN CAMAT;**
- YSH. SDR. DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT, CERDIK PANDAI, TOKOH PEMUDA, PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN PIMPINAN ORMAS, REKAN-REKAN DARI UNSUR LSM DAN PERS;**
- YSH. TAMU UNDANGAN, SERTA HADIRIN HADIRAT SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.**

PERTAMA-TAMA MARI KITA MENGHATURKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS NIKMAT KESEHATAN DAN KELAPANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA KITA SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN SIDANG PARIPURNA DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG KITA BANGGAKAN INI.

KITA MENYADARI BAHWA MOMENTUM PENYAMPAIAN NOTA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN 2025, *NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027 DAN NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026* INI BELUMLAH SEMPURNA, OLEH KARENA ITU KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI APRESIASI SEHINGGA DAPAT MENJADI DASAR DALAM PROSES PERBAIKAN KE DEPAN.

SELANJUTNYA, SHALAWAT BERIRING SALAM TAK LUPA PULA KITA SAMPAIKAN KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MEMBERIKAN CONTOH DAN SURI Tauladan dalam menempuh kehidupan dan dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

SALAM SHILATURRAHIM TERIRING DO'A SEMOGA KITA SEMUA SENANTIASA DALAM LINDUNGAN ALLAH SWT SERTA SUKSES MENGEMBAN AMANAH YANG DIBERIKAN RAKYAT ACEH TENGGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN ACEH TENGGARA MENUJU MASYARAKAT YANG MAKMUR, SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT.

SAUDARA PESERTA SIDANG YANG BERBAHAGIA...

PADA KESEMPATAN INI, IZINKAN KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN SETINGGI- TINGGINYA KEPADA ANGGOTA DEWAN TERHORMAT, KARENA TELAH MENGAMATI, MENCERMATI, MEMBAHAS SEKALIGUS MEMBERIKAN DUKUNGAN, KRITIKAN DAN SARAN KEPADA KAMI. KAMI MENYADARI, MASIH MEMILIKI BANYAK KELEMAHAN SEHINGGA MUNGKIN ADA KATA-KATA DAN PERBUATAN KAMI YANG TIDAK BERKENAN SELAMA PERSIDANGAN INI, UNTUK ITU KAMI MEMOHON MAAF SEBESAR BESARNYA KEPADA BAPAK IBU ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.

SEIRING DENGAN ROMANSA YANG SUDAH KITA LAKUKAN SELAMA INI, MAKA TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI BAHWA KITA TELAH MERASAKAN KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN DALAM PROSES PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN 2025 SEHINGGA DAPAT TERLAKSANA DENGAN TEPAT WAKTU, SESUAI REGULASI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. SEHINGGA KEDEPAN KITA BERHARAP PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (*PERFORMANCE BASED BUDGETING*) DAPAT TERWUJUD DAN TERLAKSANA DENGAN BAIK DI BUMI SEPAKAT SEGENEP KABUPATEN ACEH TENGGARA INI.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT!!!

DALAM RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN 2025, *NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027 DAN NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026* INI, KITA MENGANUT ANGGARAN SECARA DEFISIT, HAL TERSEBUT DISEBABKAN OLEH BANYAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG PERLU KITA TAMPUNG. NAMUN DEMIKIAN, KITA HARUS TETAP OPTIMIS DAN BERSABAR DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN PENGANGGARAN, SERTA MEREALISASIKANNYA SECARA BAIK, SEHINGGA TERWUJUD

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN SELURUH PESERTA RAPAT YANG KAMI HORMATI.....

BERIKUT AKAN KAMI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM, PENDAPAT SERTA SARAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG TELAH MEMBERIKAN SEMANGAT DAN MOTIVASI KEPADA KAMI DALAM MEWUJUDKAN ACEH TENGGARA YANG LEBIH BAIK. YAITU SEBAGAI BERIKUT:

1. PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SDR: H. MARWAN HUSNI, S.Sos

PENDAPAT ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, TERHADAP RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN TAHUN 2025, NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027 DAN NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026, SEBAGAI BERIKUT :

1. SEHUBUNGAN DENGAN PERMASALAHAN FASILITAS SEKOLAH DI WILAYAH PLOKOKAN/PINGGIRAN, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA TELAH DILAKUKAN INTERFENSI PERBAIKAN SEKOLAH SEPERTI DI KECAMATAN LEUSER PADA TAHUN 2025 TELAH DILAKSANAKAN REHABILITASI RUANG BELAJAR PADA TINGKAT SMP DAN DI KECAMATAN LAWE SIGALA-GALA ADA 4 RUANG MCK DAN MESS GURU. SELANJUTNYA PADA TAHUN 2026 INI KITA MELAKUKAN REHAB RKB LABORATORIUM IPA. TERKAIT PENUMPUKAN GURU PPPK DI KOTA DAN KEKURANGAN DI DAERAH TERPENCIL, MAKA KAMI AKAN MELAKUKAN PENDATAAN ULANG KEMBALI UNTUK GURU PNS/PPPK SEHINGGA DISESUAIKAN PENEMPATAN TEMPAT MENGAJAR DENGAN DOMISILI SERTA SEKOLAH YANG MASIH KEKURANGAN TENAGA PENGAJAR. SELANJUTNYA UNTUK HAL INSENTIF GURU SAAT INI SEDANG DALAM PROSES PENCAIRAN DARI PEMERINTAH PUSAT MENDIKDASMEN YANG AKAN DI TRANSFER LANGSUNG KE REKENING MASING-MASING GURU. TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN PENINGKATAN KAPASITAS/PELATIHAN GURU DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA DINAS PENDIDIKAN TELAH MELAKUKAN PELATIHAN TERHADAP GURU, SEPERTI PENINGKATAN IT DI BIDANG CODING DAN KOMPETISI MUATAN LOKAL.
2. MENGENAI PERMASALAHAN PENGANGGARAN AGAR EFEKTIVITAS, EFISIENSI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI DINAS KESEHATAN DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN KESEHATAN TELAH MENERAPKAN PERENCANAAN BERBASIS KINERJA YAITU DENGAN MENYUSUN PROGRAM BERDASARKAN KELUARAN (*OUTPUT*) DAN HASIL (*OUTCOME*) YANG TERUKUR DEMI MEMASTIKAN SETIAP DANA YANG TEREALISASI TEPAT SASARAN. TERKAIT PERMASALAHAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH TERPENCIL, DINAS KESEHATAN TELAH MENEMPATKAN TENAGA KESEHATAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN YANG TERTAMPUNG DALAM APLIKASI SISDMK DAN RENBUT PADA MASING MASING FASILITAS KESEHATAN DENGAN CARA MEMBUKA PELUANG PEREKRUTAN TENAGA CPNS, PPPK DAN TENAGA KHUSUS (TUGSUS).

DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA SETIAP TAHUN MENDAPATKAN ALOKASI ANGGARAN DAU DAN DAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SERTA PROGRAM LAINNYA DEMI MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL.

3. SEHUBUNGAN DENGAN PERMASALAHAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PUSKESMAS, MAKA DINAS KESEHATAN SELALU MELAKUKAN KOORDINASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB), RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK), TERMASUK DANA JKN MAUPUN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK). DINAS KESEHATAN JUGA MELAKUKAN MONITORING SERTA EVALUASI TERHADAP REALISASI BELANJA PUSKESMAS AGAR PENGGUNAANNYA AKUNTABEL, TRANSPARAN, DAN TEPAT SASARAN. DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SECARA BERKALA MELAKUKAN REKONSILIASI DATA KEUANGAN GUNA MEMASTIKAN KESESUAIAN, VALIDITAS SERTA KETERTIBAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)
4. PERMASALAHAN PEMENUHAN DAN PEREMAJAAN BUKU DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PADA TAHUN INI SUDAH DIANGGARKAN DAN AKAN SEGERA DIREALISASIKAN, TERKAIT FREKUENSI OPERASIONAL PUSTAKA KELILING SUDAH KITA TINGKATKAN DAN UNTUK DAERAH TERPENCIL, MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR PERPUSTAKAAN KELILING SEDANGKAN UNTUK DAERAH YANG JANGKAUANNYA DAPAT DILALUI RODA EMPAT MENGGUNAKAN MOBIL PUSTAKA KELILING KE SEKOLAH-SEKOLAH BAIK SD, SMP MAUPUN SLTA, SEDANGKAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN DIGITAL SAAT INI MASIH TETAP BISA DIAKSES OLEH MASYARAKAT MELALUI APLIKASI PERPUS AGARA *E-LIBRARY*, DAN AKSES INTERNET GRATIS JUGA DAPAT DINIKMATI OLEH MASYARAKAT YANG BERKUNJUNG KE DINAS PERPUSTAKAAN, DINAS PERPUSTAKAAN JUGA TELAH MENGADAKAN BIMTEK TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS PARA PUSTAKAWAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA. TERKAIT PENINGKATAN KINERJA KEARSIPAN MAKA PADA TAHUN 2025 DINAS PERPUSTAKAAN SUDAH MENGAPLIKASIKAN SRIKANDI DAN JIKN. DINAS PERPUSTAKAAN JUGA SUDAH BERKOORDINASI DENGAN DINAS PERTANIAN UNTUK MENDOKUMENTASIKAN VARIETAS DURIAN UNGGULAN YANG TELAH TERDAFTAR DI KEMENTAN SEHINGGA DAPAT DIAKSES SECARA NASIONAL MELALUI APLIKASI JIKN ANRI, DENGAN HARAPAN VARIETAS LOKAL ACEH TENGGARA TERJAGA SUMBER INFORMASINYA DAN MENJADI SUMBER INFORMASI BAGI PENELITI, PELAJAR, SERTA GENERASI MENDATANG.
5. TERKAIT CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA TIDAK ADA PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG MELAMPAUI TARGET YANG SUDAH DI TETAPKAN, UNTUK PERSENTASE CAPAIAN PAD TERDIRI DARI:

- PENDAPATAN PAJAK DAERAH 86,30%
- PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 95,66%,
- HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH 92,30%
- LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 53,34%.

DARI HAL TERSEBUT MAKA JENIS PAD PADA LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TIDAK MENCAPAI TARGET DI KARENAKAN SALAH SATUNYA ADALAH TURUNNYA JUMLAH PASIEN BERKUNJUNG KE RUMAH SAKIT SEHINGGA KLAIM BPJS IKUT TURUN DAN BERDAMPAK TERHADAP TURUNNYA PENDAPATAN DI BLUD/NON RKUD (RSUD).
LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN ADALAH PEMETAAN OBYEK PENDAPATAN DAERAH 2 KALI DALAM SATU BULAN DAN MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA OPD TERKAIT YANG MEMBIDANGI OBYEK PAJAK DAN RETRIBUSI.

PENERAPAN QRIS SUDAH DILAKUKAN DAN DISOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT BEGITU JUGA PENERAPAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. DAN UNTUK SYSTEM DIGITALISASI LAINNYA AKAN DIUPDATE DAN DIPERBAHARUI SECARA BERTAHAP.

TERHADAP PERMASALAHAN ASET DAERAH YANG MENGANGGUR ATAU BELUM DIMANFAATKAN TELAH DILAKUKAN PENDATAAN SECARA BERTAHAP UNTUK DIJADIKAN POTENSI PENERIMAAN DAN PENINGKATAN PAD KEDEPAN. TERKAIT DENGAN RUKO, LAHAN DAN BANGUNAN DAERAH MAKA KAMI PERINTAHKAN KEPADA KEPALA BIDANG ASET BPKD UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN DALAM MENYUSUN STRATEGI PENINGKATAN PAD.

TERKAIT PERMASALAHAN SILPA DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PADA TAHUN 2025 SEBESAR Rp2.625.971.399,84 DENGAN RINCIAN KAS DI KAS DAERAH Rp2.159.313.113,99 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Rp114.116.420,00, KAS DI BLUD Rp351.998.405,31, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN DANA BOK Rp484.416,09, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN DANA BOS Rp3.901,25 KAS LUAR BIASA Rp55.143,20. UNTUK PERMASALAHAN LIKUIDITAS APBK TELAH DISUSUN ANGGARAN KAS PADA AWAL TAHUN NAMUN KARENA APBK ACEH TENGGARA MENGANUT DEFISIT ANGGARAN MAKA POTENSI TIDAK TERBAYARKAN KEGIATAN PADA PIHAK KETIGA DAN HAK-HAK TENAGA ASN DIMINIMALISIR DENGAN CARA MEMPRIORITASKAN PEMBAYARAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG URGEN.

6. KITA AKAN BERUPAYA MENINGKATKAN PROGRAM DAKWAH, PEMBINAAN AQIDAH DAN PERBAIKAN MORAL/AKHLAK MASYARAKAT KHUSUSNYA DALAM MEMBENTENGI GENERASI MUDA DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA, JUDI ONLINE DAN PELANGGARAN SYARIAT ISLAM LAINNYA SEMAKSIMAL MUNGKIN DAN BEKERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDER SEPERTI APARAT PENEGAK HUKUM.

SAYA PERINTAHKAN KEPADA KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM DAN SATPOL PP AGAR MELAKUKAN SOSIALISASI, PENCEGAHAN MAUPUN PENINDAKAN PELANGGARAN QANUN JINAYAT DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.
TERKAIT KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK KEBERLANJUTAN PEMBINAAN LPTQ DAN PELAKSANAAN MTQ, MAKA SAYA PERINTAHKAN KEPADA KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM AGAR MENYUSUN RENJA KEDEPAN SECARA BAIK SEHINGGA KEGIATAN TERSEBUT DAPAT TERANGGARKAN DAN TERLAKSANA SESUAI HARAPAN.

DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TELAH MEMBANGUN KOLABORASI DAN SINERGI DENGAN MAJELIS ADAT ACEH, MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, DAN PESANTREN/DAYAH MELALUI PROGRAM PEMBINAAN, SOSIALISASI QANUN, DAN PENYELESAIAN MASALAH SYARIAT SECARA TERINTEGRASI. DENGAN MAA SINERGI DILAKUKAN DALAM PROGRAM KAMPUNG SYARIAT DAN PENYELESAIAN KASUS MELALUI ADAT. DENGAN MPU SINERGI DILAKUKAN DALAM BENTUK PELATIHAN MUBALLIGH, TIM FATWA, DAN SAFARI DAKWAH. SEMENTARA DENGAN PESANTREN/DAYAH SINERGI DILAKUKAN MELALUI PROGRAM DUTA SYARIAT, PEMBINAAN MTQ, DAN EKONOMI SYARIAH. KOLABORASI INI BERTUJUAN AGAR PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TENGGARA BERJALAN BERBASIS ADAT, ULAMA, DAN MASYARAKAT.

7. PENANGANAN TERHADAP STUNTING OLEH DPPKB BERFOKUS PADA SASARAN KELUARGA BERISIKO STUNTING DI ACEH TENGGARA TERUS MENGALAMI PENURUNAN INI DIBUKTIKAN BERDASARKAN DATA TIGA TAHUN TERAKHIR YAITU TAHUN 2023 SEBANYAK 13.410 JIWA, TAHUN 2024 SEBANYAK 9.170 JIWA DAN TAHUN 2025 SEBANYAK 8.984 JIWA.

DARI 385 DESA TERDAPAT KADER TPK SEBANYAK 1.488 ORANG DAN MENDAPATKAN UANG INSENTIF SERTA UANG PULSA AGAR BISA MENYUKSESKAN PENCATATAN DAN PELPORAN PADA APLIKASI SIGA DAN ELSIMIL.

DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA EVALUASI TERKAIT KAMPUNG KB, SEMUA KUTE DI ACEH TENGGARA SUDAH MENJADI KAMPUNG KB 100% DENGAN KLASIFIKASI:

- | | | |
|------------------|------------|----------|
| a. DASAR | = 10 DESA | (2,58%) |
| b. BERKEMBANG | = 7 DESA | (1,81%) |
| c. MANDIRI | = 207 DESA | (53,49%) |
| d. BERKELANJUTAN | = 163 DESA | (42,12%) |

8. TERKAIT STRATEGI PROMOSI YANG DILAKUKAN DENGAN CARA BEKERJA SAMA DENGAN TREVEL AGEN DAN HPI SERTA MEMBUAT KALENDER EVENT NASIONAL ATAU INTERNASIONAL.

SEHUBUNGAN DENGAN QANUN SYARIAH TERHADAP TAMU WISATA, KITA MENJAGA DAN MEMASTIKAN DI OBYEK WISATA TETAP BERJALAN ATAS NORMA-NORMA AGAMA DAN ATURAN SYARIAT ISLAM DENGAN CARA MEMASANG SPANDUK ATAU BALIHO DI TEMPAT-TEMPAT OBYEK WISATA.

TERKAIT ANGGARAN PROGRAM KNPI DAN OKP/KARANG TARUNA KITA TELAH MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP PEMUDA YAITU PELATIHAN KEPELOPORAN PEMUDA DAN KEWRISAUSAHAAN PEMUDA DI TAHUN 2025 DAN PRESTASI YANG DICAPAI KONI DALAM AJANG KEJURDA ATAU PORA DENGAN MERAHAIH 9 MEDALI EMAS, 9 MEDALI PERAK DAN 11 MEDALI PERunggu.

9. KAMI SEPENDAPAT DENGAN SARAN DAN MASUKAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM KADERISASI ULAMA MUDA DALAM MEMFASILITASI SINERGI MPU DENGAN LEMBAGA KEAGAMAAN LAINNYA. DALAM HAL MENDUKUNG FATWA DAN TAUSIAH YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT SEBAGAI BENTENG DALAM MENGANTISIPASI PENYAKIT MASYARAKAT. KITA BERHARAP KEDEPAN ULAMA MUDA MAMPU MENYAMPAIKAN PEMAHAMAN DAN PENCEGAHAN SERTA MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

10. TERKAIT DANA HIBAH, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA BAGIAN KESEJAHTERAAN DI SEKDAKAB HANYA MEMFALISITASI MENERBITKAN REKOMENDASI BANTUAN MASJID DAN MEUNASAH YANG BERASAL DARI PROVINSI.

UNTUK PELAYANAN BAGI JEMA'AH HAJI ACEH TENGGARA SAMPAI SAAT INI BERJALAN DENGAN BAIK, PADA SAAT PELEPASAN JEMA'AH HAJI PEMERINTAH DAERAH MEMFASILITASI AKOMODASI DAN TRANSPORTASI BAIK DARAT MAUPUN UDARA JUGA DIBERIKAN BAJU BATIK NASIONAL DAN SELEMPANG SEBAGAI TANDA JEMA'AH HAJI DARI ACEH TENGGARA, SELAIN ITU SATU SATUNYA PEMERINTAH DAERAH YANG MEMFASILITASI JEMA'AH HAJI DENGAN MENGGUNAKAN PESAWAT UDARA DI ACEH.

UNTUK KEGIATAN HARI-HARI BESAR ISLAM DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA TIDAK SEMUA BERADA DI BAGIAN KESRA, SEBAHAGIAN TERDAPAT PADA DINAS SYARI'AT ISLAM, KEDEPANYA KAMI HARAPKAN BAGIAN KESRA AKAN TERUS MENDORONG POLA KOLABORASI DAN KETERLIBATAN YANG LEBIH LUAS.

11. TERKAIT DENGAN KETIDAK HADIRAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH, KAMI PERINTAHKAN KEPADA SEKDA UNTUK MENEGUR SECARA TERTULIS KEPADA YANG BERSANGKUTAN DAN KEDEPAN JANGAN MENGULANG KESALAHAN TERSEBUT.

12. KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH ATAS APRESIASI FRAKSI PAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRK KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD H. SAHUDIN KUTACANE, YANG SECARA SIGNIFIKAN PERUBAHAN TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD H SAHUDIN KUTACANE SANGAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT, BAIK MASYARAKAT SEBAGAI PASIEN YANG BEROBAT JALAN MAUPUN PASIEN RAWAT INAP. UNTUK ITU KAMI HARAPKAN DIREKTUR RSUD H. SAHUDIN KUTACANE BESERTA STAF AGAR TETAP BERKOMITMEN TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT, MULAI DARI KETERSEDIAAN OBAT-OBATAN DAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERALATAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK) YANG TUJUAN UTAMANYA ADALAH MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG PARIPURNA. UNTUK ITU SEBAGAI RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI PUSKESMAS-PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT SWASTA YANG ADA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA. UNTUK ITU KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPK AGAR MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK RSUD H. SAHUDIN DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN MEDIS AGAR TERPENUHI DAN DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL KEPADA MASYARAKAT.

13. PEMERINTAH DAERAH BERKOMITMEN PENUH MEMASTIKAN SELURUH ASN (PNS, PPPK PENUH WAKTU DAN PPPK PARUH WAKTU) MENAATI JAM KERJA. KAMI PERINTAHKAN KEPALA BKPSDM AGAR SEOPTIMAL MUNGKIN MEMONITORING DAN MENGEVALUASI PENGGUNAAN SISTEM ABSENSI BERBASIS DIGITAL (APLIKASI/FITUR BERBASIS LOKASI DAN WAJAH). UNTUK MENGANTISIPASI KECURANGAN OKNUM ASN YANG MENINGGALKAN KANTOR SETELAH ABSEN, KAMI MENGINSTRUKSIKAN KEPALA OPD SELAKU ATASAN LANGSUNG UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN MELEKAT SECARA BERJENJANG SESUAI DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. TERKAIT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, TARGET KINERJA SERTA MEKANISME PEMBINAAN DAN EVALUASI PPPK DAN PPPK PARUH WAKTU, PEMERINTAH MELALUI KEMENTERIAN PANRB MENJELASKAN BAHWA PEMBAGIAN TUGAS PPPK PENUH SUDAH DIATUR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEdangkan PPPK PARUH WAKTU AKAN DISESUAIKAN DENGAN JAM KERJA YANG LEBIH FLEKSIBEL DAN TIDAK PENUH WAKTU. DESAIN TUGAS DIFOKUSKAN AGAR FUNGSI-FUNGSI OPERASIONAL MENDASAR DI INSTANSI TETAP BERJALAN TANPA MEMBEBANI PEGAWAI MELEBIHI ASAS KEADILAN PENDAPATAN MEREKA.

TERKAIT DENGAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI ASN (PNS, PPPK PENUH WAKTU DAN PPPK PARUH WAKTU) YANG BERPRESTASI, PEMERINTAH DAERAH BERKOMITMEN TERUS AKAN MEMBERIKAN REWARD YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH. SEDANGKAN BAGI ASN YANG MELANGGAR KETENTUAN, PEMERINTAH DAERAH SANGAT TEGAS MEMBERIKAN SANKSI, MULAI DARI SANKSI DISIPLIN RINGAN, SEDANG DAN BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT (PTDH).

II. PANDANGAN UMUM FRAKSI SELAYAKH

DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SDR: SATRIA ABADI

PENDAPAT ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, ATAS RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN TAHUN 2025, NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027 DAN NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026, TERKAIT :

1. PELAKSANAAN APBK TAHUN 2025 DENGAN LEBIH MENINGKATKAN DAN MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH ACEH SERTA PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH. JUGA MELAKUKAN EFESIENSI ATAS BELANJA DAERAH DENGAN LEBIH MEMPRIORITASKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT SERTA DILAKUKAN PENGAWASAN ATAS SETIAP PENDAPATAN MAUPUN BELANJA DAERAH, UNTUK ITU KAMI SEPENDAPAT DENGAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DAN SEMOGA KEDEPAN LEBIH BAIK LAGI.
2. PELAKSANAAN EKSPOSE ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH OPD-OPD MERUPAKAN BAGIAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH LEGISLATIF KEPADA EKSEKUTIF. UNTUK ITU KAMI SANGAT MENGAPRESIASI ATAS KINERJA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.
3. MASIH RENDAHNYA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM HAL PENGELOLAAN KEUANGAN PADA APBK TAHUN 2025 MERUPAKAN DAMPAK DARI PEMOTONGAN TKD DARI PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA MENYEBABKAN TERJADINYA EFISIENSI ANGGARAN BELANJA. UNTUK ITU KAMI MENGINGATKAN BPKD AGAR LEBIH MENINGKATKAN KINERJA KEDEPANNYA DALAM MENGELOLA APBK.
4. SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT AGAR MELAKUKAN EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGARA KUTACANE KARENA SELAMA INI BELUM MAKSIMAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN AIR MINUM KEPADA MASYARAKAT. UNTUK ITU KAMI PERINTAHKAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MELAKUKAN PENDAMPINGAN DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN AIR MINUM TERSEBUT.
5. SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT AGAR MELAKUKAN EVALUASI KINERJA BAGIAN EKONOMI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA KARENA BELUM MAKSIMAL DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI SEPerti YANG DIHARAPKAN MASYARAKAT. UNTUK ITU KAMI SANGAT SETUJU DAN SAAT INI KEPALA BAGIAN EKONOMI SETDAKAB SUDAH DIGANTI DAN KEDEPAN DIHARAPKAN LEBIH BAIK LAGI.
6. TERKAIT ANGGARAN DAN REALISASI DBH SAWIT TAHUN ANGGARAN 2023, 2024 DAN 2025 TERBAGI ATAS: PENANGANAN JALAN SEBESAR RP6.071.665.600 PADA DINAS PUPR. PENDATAAN PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT SEBESAR Rp1.070.356.400 PADA DINAS PERTANIAN. PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN SEBESAR RP99.000.000 PADA DINAS PERTANIAN. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK SERTIFIKASI INDONESIA (ISPO) PERKEBUNAN SEBESAR RP126.800.000 PADA DINAS PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT SEBESAR RP221.760.000 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TEREALISASI SEBESAR RP221.760.000 (SUDAH TEREALISASI PADA TAHUN 2025). BERDASARKAN BERITA ACARA REKONSILIASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN (DJPK) DAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA. SISA DBH SAWIT S.D TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR RP8.049.661.700 (*DELAPAN MILYAR EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS RUPIAH*).
7. KAMI SEPENDAPAT DENGAN MASUKAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT UNTUK MEMBANGUN POS BANTU PENGADUAN MASYARAKAT PERBATASAN KECAMATAN LEUSER DENGAN KECAMATAN LAU BALENG TANAH KARO. UNTUK ITU KAMI HARAPKAN ASISTEN PEMERINTAHAN SEGERA MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT.
8. TERKAIT USULAN KAJIAN PENYUSUNAN QANUN TENTANG LAHAN PERTANIAN KAMI SEPENDAPAT DENGAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT. HAL INI AKAN MENGEMBALIKAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN YANG SELAMA INI DIALIHFUNGSIKAN UNTUK LAHAN PERUMAHAN PENDUDUK. UNTUK ITU KAMI MEMINTA KEPALA DINAS PERTANIAN AGAR SEGERA MENYUSUN KAJIAN LAHAN PERTANIAN YANG MASIH PRODUKTIF SERTA BERKOORDINASI DENGAN BAPPEDA.

III. PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA

DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT: SDR MUSLIADI

PENDAPAT ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT TERHADAP RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN TAHUN 2025, NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027 DAN NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 TERKAIT :

KAMI SANGAT MENGAPRESIASI SARAN DAN MASUKAN ANGGOTA DEWAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI, PERBAIKAN SISTEM PEMUNGUTAN SERTA SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK. SELANJUTNYA DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN ASET DAERAH DENGAN MEMAMFAATKAN LAHAN YANG PRODUKTIF SEPerti TANAH, BANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

KAMI JUGA SEPENDAPAT ATAS PERLUNYA PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN INVESTASI DARI LUAR DAERAH DENGAN MENAWARKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR UNTUK BERINVESTASI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

YANG TIDAK KALAH PENTINGNYA JUGA MENDORONG TUMBUH KEMBANGNYA SEKTOR PARIWISATA YANG NANTINYA AKAN MEMBERIKAN DAMPAK MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH. PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK HARUS DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI DAN BISA DIAKSES OLEH MASYARAKAT UMUM.

SELANJUTNYA ATAS CATATAN DAN SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA:

1. TERKAIT PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL SAWIT YANG PROGRAM KEGIATANNYA UNTUK MENDUKUNG PRODUKTIFITAS HASIL SAWIT DAN PENINGKATAN AKSES TRANSPORTASI KE LAHAN PERKEBUNAN SAWIT SEPERTI PENINGKATAN JALAN MERANTI-LUMBANG TUA, PEMBANGUNAN JALAN JAMBUR MAMANG-LAWE MEKHUNTUH KECAMATAN DARUL HASANAH DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA KEDUA RUAS JALAN TERSEBUT TELAH MEYELESAIKAN PROSES PELELANGAN TETAPI KARENA BEBERAPA HAL YANG PERLU DISELESAIKAN DENGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM MAKA PEKERJAAN TERSEBUT BELUM DAPAT KAMI PROSES PELAKSANAAN SAMPAI SAAT INI.
2. DALAM HAL PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT KAMI PERINTAHKAN SAUDARA KEPALA SATPOL PP DAN WH UNTUK SEGERA MELAKUKAN PENERTIBAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, PERJUDIAN, PENCURIAN, PROTITUSI YANG SEMAKIN MEREBAK DAN MERESAHKAN MASYARAKAT.
3. KAMI MENYADARI LUASNYA WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DIBANDINGKAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN KITA SAAT INI SEHINGGA MENYEBABKAN MASIH BANYAK DAERAH YANG BELUM OPTIMAL DAN TERSENTUH PEMBANGUNAN SECARA MERATA BAIK DARI BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN FASILITAS SOSIAL LAINNYA TERUTAMA DI DAERAH KECAMATAN LEUSER. UNTUK ITU KEDEPAN DENGAN ADANYA USULAN PENAMBAHAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH DARI PEMERINTAH PUSAT KITA HARAPKAN AKAN MENJADI PERIORITASKAN DAERAH.
4. KAMI SEPENDAPAT DENGAN SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT AGAR DINAS PARWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA UNTUK MELAKUKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAN DESTINASI WISATA LOKAL WISATA ALAM KETAMBE SERTA ARUNG JERAM JUGA DIHARAPKAN DAPAT MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA SEBAGAI AJANG PENCARIAN BAKAT. PADA TAHUN 2025 INI ADA 5 EVENT TERLAKSANA YANG SUDAH KITA LAKSANAKAN SEPERTI PEKAN OLAH RAGA PELAJAR KABUPATEN, SEPAK BOLA BUPATI CUP, SELEKSI ATLET DAERAH, JALAN SANTAI DAN PRAPORA YANG NANTINYA DIHARAPKAN MENAMBAH POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH.
5. TERKAIT PENYALAHGUNAAN FASILITAS KESEHATAN, SEPERTI PUSKESDES DAN PUSTU TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSINYA UNTUK ITU SAYA PERINTAHKAN KEPALA DINAS KESEHATAN SEGERA BERKOORDINASI DENGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA UNTUK DAPAT MENGEMBALIKAN FUNGSI FASILITAS KESEHATAN YANG SANGAT DIBUTUHKAN MASYARAKAT TERSEBUT.
6. DALAM PELAKSANAAN MTQ TAHUN 2025 DINAS SYARIAT ISLAM BERSAMA STAKHOLDER SUDAH BERUSAHA MAKSIMAL DALAM MENINGKATKAN PRESTASI NAMUN HASILNYA BELUM MAKSIMAL. UNTUK ITU KEDEPAN KAMI BERUSAHA LEBIH MAKSIMAL DALAM MENINGKATKAN PRESTASI DAN MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA TERKAIT DALAM MEMBINA PUTRA-PUTRI ACEH TENGGARA KHUSUSNYA BIDANG MTQ.
7. APRESIASI ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DALAM PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK TAHUN 2026 YANG TELAH DIAKOMODIR DALAM PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PENGULU SERENTAK DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA. KEDEPAN KAMI AKAN MENJALANKAN SELURUH TAHAPAN DENGAN BAIK SERTA MENGHARAPKAN PERAN AKTIF SELURUH STAKEHOLDER DAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT DEMI TERCAPAINYA PILKADES YANG JUJUR, ADIL, BERMARTABAT, AMAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
8. APRESIASI ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT ATAS PENCAPAIAN TERBAIK KE-7 SE-ACEH PADA PENILAIAN PEKPP NASIONAL TAHUN 2026 DALAM PELAYANAN PUBLIK TERBAIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. KAMI SANGAT MENDUKUNG UNTUK ITU KEDEPAN PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMBERIKAN DUKUNGAN ANGGARAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK LAGI.
9. KEBERHASILAN DINAS PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MERUPAKAN HASIL KERJA KERAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. OLEH KARENA ITU KAMI MEMBERIKAN APRESIASI ATAS PENINGKATAN KINERJA TERSEBUT YANG NANTINYA DAPAT DIKUTI OLEH OPD LAINNYA.
10. PENGEMBANGAN VARIETAS DURIAN LOKAL DARI KABUPATEN ACEH TENGGARA YAITU DURIAN JONSON DARI KECAMATAN LEUSER DAN DURIAN JANTUNG DARI KECAMATAN KETAMBE YANG TELAH DIDAFTARKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH MERUPAKAN LOMPATAN BESAR BAGI PETANI DURIAN LOKAL UNGGUL KABUPATEN ACEH TENGGARA.

IV. PANDANGAN UMUM FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SDR: MUHARI KASTURI

PENDAPAT ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025, RANCANGAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027, RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 TERKAIT:

1. SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT TERKAIT PERLUNYA PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN AGAR TARGET PENDAPATAN MAUPUN BELANJA LEBIH REALISTIS DAN DAPAT DICAPAI SECARA OPTIMAL, KAMI SEPENDAPAT DENGAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT PERIHAL PERLUNYA PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN AGAR TARGET PENDAPATAN MAUPUN BELANJA LEBIH REALISTIS DAN DAPAT DICAPAI, KEDEPAN KAMI AKAN MENINGKATKAN KAPASITAS SDM SERTA MEMASTIKAN APARATUR ATAU PENGELOLA ANGGARAN MEMILIKI KOMPETENSI YANG MEMADAI DALAM MERUMUSKAN PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA.
2. PERIHAL PERLUNYA MEMPERKUAT STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI DIGITALISASI PERPAJAKAN, OPTIMALISASI ASET DAERAH DAN PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG ADA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA, KAMI SEPAHAM DENGAN ANGGOTA DEWAN

- YANG TERHORMAT PERIHAL PENTINGNYA MEMPERKUAT STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
3. SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT TERKAIT PERLUNYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BELANJA MODAL AGAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAPAT SELESAI TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN, TEPAT GUNA DAN MEMBERIKAN MANFAAT LANGSUNG SEHINGGA DAPAT DI RASAKAN OLEH MASYARAKAT DI BUMI METUAH YANG SAMA-SAMA KITA CINTAI INI, KAMI SEPENDAPAT DENGAN SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT TENTANG PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BELANJA MODAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TEPAT WAKTU, KEDEPAN KAMI AKAN BERUSAHA SECARA MAKSIMAL AGAR PELAKSANAAN BELANJA MODAL DAPAT DIKERJAKAN LEBIH CEPAT, TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN, TEPAT GUNA DAN EFEKTIF SERTA EFESIEN, SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT.
 4. SEHUBUNGAN DENGAN PERLUNYA PIHAK EKSEKUTIF MELAKUKAN EVALUASI YANG MENYELURUH TERHADAP RENDAHNYA PELAYANAN PUBLIK DARI ASN MULAI DARI PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI SEPERTI PENERBITAN KTP DAN KARTU KELUARGA MASIH MEMERLUKAN WAKTU YANG MENGURAS ENERGI DALAM KEPENGURUSANNYA, KAMI SEPENDAPAT DENGAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, KEDEPAN KAMI AKAN MELAKUKAN EVALUASI MENYELURUH TERHADAP ASN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PUBLIK DISELURUH INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KHUSUSNYA PADA PELAYANAN KESEHATAN DAN DISDUKCAPIL.
 5. TERKAIT DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN YANG HARUS MAMPU MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP EFESIENSI, TRANSPARANSI, AKUNTABLE DAN BERKEADILAN, KAMI AKAN BERUPAYA SECARA MAKSIMAL AGAR SETIAP RUPIAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
 6. SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT TERKAIT AGAR SEMUA CATATAN-CATATAN DARI BPK RI YANG MASIH TERSISA DAN BELUM DISELESAIKAN KIRANYA SEGERA UNTUK DITINDAKLANJUTI SECARA TUNTAS SEHINGGA KUALITAS TATA KELOLA KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA SEMAKIN BAIK PADA TAHUN-TAHUN YANG AKAN DATANG, KAMI SEPENDAPAT DENGAN SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, DAN KAMI PERINTAHKAN INSPEKTUR SERTA KEPALA OPD TERKAIT UNTUK SECEPATNYA MENYELESAIKAN CATATAN-CATATAN DARI BPK RI HINGGA TUNTAS.
 7. TERHADAP SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT PERIHAL PERLUNYA UNTUK DILAKUKAN PEMBANGUNAN PAGAR KECAMATAN BABUL MAKMUR, AGAR KESAN BAIK DAPAT TERCERMIN BAGI SIAPAPUN SAAT MEMASUKI KABUPATEN ACEH TENGGARA, KAMI SEPENDAPAT DENGAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT PERIHAL PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR CAMAT KECAMATAN BABUL MAKMUR, DAN AKAN KAMI ANGGARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2027 SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
 8. BERKAITAN DENGAN SARAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT TERHADAP PERBAIKAN JALAN ANTARA DESA KEBUN SERE MENUJU LAPANGAN TERBANG ALAS LEUSER ANTARA DI KECAMATAN SEMADAM, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PERBAIKAN JALAN ANTARA DESA KEBUN SERE MENUJU LAPANGAN TERBANG ALAS LEUSER ANTARA DI KECAMATAN SEMADAM SAAT INI SEDANG DALAM TAHAP Pengerjaan dan diharapkan dapat selesai sebelum berakhir tahun anggaran 2026.
 9. PERIHAL PERLUNYA MENGAMBIL LANGKAH YANG SOLUTIF DI SEMUA TINGKATAN AGAR JANGAN ADA ISU MIRING DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT BAHWA KEADAAN SAAT INI SEDANG TIDAK BAIK-BAIK SAJA, HAL TERSEBUT TIDAK BENAR ADANYA. DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA SITUASI SAAT INI DALAM KEADAAN TERKENDALI SEBAGAIMANA HARAPAN KITA BERSAMA-SAMA. TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT KITA TERUS BERKOORDINASI DENGAN FORKOPIMDA.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI....

KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI SETINGGI TINGINYA KEPADA UNSUR PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA FRAKSI DAN ANGGOTA DEWAN YANG SANGAT MEMAHAMI SITUASI DAN KONDISI YANG ADA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025, RANCANGAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027, RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026.

DEMIKIANLAH JAWABAN DAN PENJELASAN ATAS PANDANGAN UMUM DARI FRAKSI-FRAKSI DPRK ACEH TENGGARA TERHADAP RANCANGAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025, RANCANGAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027, RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 SEMOGA KITA SEMUA SENANTIASA DIBERI KEKUATAN, HIDAYAH DAN KARUNIA OLEH ALLAH SWT.

KAMI JUGA MENYADARI BAHWA JAWABAN DAN PENJELASAN YANG DISAMPAIKAN BELUMLAH SEMPURNA, NAMUN KAMI BERHARAP DENGAN PENGERTIAN DAN KERJASAMA YANG BAIK SEMUA PERSOALAN AKAN DAPAT DISELESAIKAN DAN SEMOGA RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN 2025 DAPAT DITETAPKAN MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

AKHIRNYA HANYA KEPADA ALLAH SWT JUGA KITA BERSERAH DIRI SERAYA MEMINTA TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, MUDAH-MUDAHAN KITA MENDAPAT PETUNJUK DAN KARUNIA DARI NYA DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MA'AF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

TERIMA KASIH.

**BILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**

HADIRIN PESERTA SIDANG YANG KAMI HORMATI

8. DENGAN TELAH DISAMPAIKANNYA JAWABAN BUPATI ACEH TENGGARA TADI --- MAKA RAPAT INI KAMI **SKOR** DAN AKAN KITA LANJUTKAN SETELAH SELESAI **SHOLAT JUM'AT** TEPATNYA PUKUL 14.00 WIB --- SEBELUM KAMI **SKOR**, PERLU KAMI BERITAHUKAN BAHWA, KEPADA KOMISI-KOMISI DPRK ACEH TENGGARA, AGAR SECEPATNYA MELAKSANAKAN RAPAT GABUNGAN KOMISI ATAS JAWABAN BUPATI ACEH TENGGARA.

RAPAT KAMI SKOR.

TOK.... (SATU KALI KETUKAN PALU)

KAMI AKHIRI

BILLAH TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB -----

PEMBICARAAN TINGKAT II

ASSALAMU' ALAIKUM WR. WB

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

SKOR KAMI CABUT KEMBALI

TOK.... (SATU KALI KETUKAN)

HADIRIN PESERTA SIDANG YANG KAMI HORMATI

BAHWA PADA RAPAT PARIPURNA PAGI MENJELANG SIANG TADI --- AGENDA KITA ADALAH, PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ACEH TENGGARA ATAS PANDANGAN UMUM ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA DARI FRAKSI-FRAKSI.

UNTUK SELANJUTNYA KITA MASUK KE ACARA BERIKUTNYA --- DENGAN AGENDA --- PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRK ACEH TENGGARA TERHADAP JAWABAN BUPATI ACEH TENGGARA --- UNTUK MEMPERSINGKAT WAKTU --- PADA KESEMPATAN YANG PERTAMA, KAMI PERSILAKAN KEPADA FRAKSI PAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA.

I. PENDAPAT AKHIR FRAKSI PAN :

Bismillah Hirrahmannirrahim
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

1. Yang Kami Hormati Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara;
2. Yang Terhormat Saudara Bupati dalam hal ini diwakili Saudara Sekda Aceh Tenggara beserta Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Yang Kami Hormati para Asisten, Staf Ahli, serta Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Jajaran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Insan Pers, serta Seluruh Undangan dan Masyarakat Bumi Sepakat Segenep yang Kami Banggakan.

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu penyampaian **Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025. Nota Kesepakatan KUA Dan PPAS APBK Aceh Tenggara T.A 2027, Nota Kesepakatan Kua Dan Ppas Perubahan Apbk Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, Perubahan Tata Tertib DPRK Aceh Tenggara Masa Jabatan 2024 - 2029 Dan Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRK Aceh Tenggara Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029**

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Hadirin dan sidang paripurna yang kami hormati,

Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban administratif dan konstitusional pemerintah daerah. Lebih dari itu, pertanggungjawaban APBK merupakan bentuk **akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat** atas setiap rupiah uang rakyat yang telah direncanakan, dialokasikan, dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan selama Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan Rapat, Para Anggota Dewan, Bupati serta Hadirin wal hadirat yang berbahagia

Terkait tentang Jawaban Saudara Bupati terhadap ; Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun 2025.
Bagi Fraksi Partai Amanat Nasional, pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa berpedoman pada prinsip **transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepatutan dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat**.

Anggaran daerah pada hakikatnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan APBK tidak semata-mata diukur dari tingkat serapan anggaran, besarnya belanja daerah, ataupun terselesainya proses administrasi keuangan, tetapi harus diukur dari **sejauh mana anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Tenggara**.

Fraksi PAN berpandangan bahwa setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pertanian, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Untuk itu, terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Amanat Nasional telah mencermati, mempelajari serta mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dari sisi capaian program pembangunan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Fraksi PAN memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, apresiasi tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi kritis DPRK sebagai representasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, Fraksi PAN memandang masih diperlukan berbagai perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan APBK pada tahun-tahun berikutnya semakin berkualitas, tepat sasaran, terukur dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan semangat **Amanat, Keadilan dan Kesejahteraan**, Fraksi PAN akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara objektif, kritis dan konstruktif. Dukungan akan kami berikan terhadap kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada rakyat, sementara terhadap kebijakan yang belum sesuai dengan kepentingan masyarakat, Fraksi PAN akan tetap memberikan kritik dan masukan sebagai bagian dari tanggung jawab politik kepada konstituen.

Namun demikian, Fraksi PAN memandang bahwa jawaban tersebut **belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan rendahnya pencapaian PAD Tahun Anggaran 2025**.

Dari penjelasan Pemerintah Daerah, diketahui bahwa realisasi Pendapatan Pajak Daerah hanya mencapai **86,30%**, Retribusi Daerah **95,66%**, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **92,30%**, sedangkan Lain-Lain PAD yang Sah hanya mencapai **53,34%**.

Bagi Fraksi PAN, capaian tersebut harus menjadi perhatian serius, karena tidak tercapainya target pada seluruh kelompok utama PAD menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam **perencanaan target, pendataan potensi, optimalisasi pemungutan, pengawasan, maupun pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah**.

Fraksi PAN tidak ingin persoalan tidak tercapainya PAD hanya dijelaskan sebagai akibat faktor eksternal, tetapi harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap **akurasi penetapan target dengan potensi riil PAD yang dimiliki Kabupaten Aceh Tenggara**.

Selanjutnya, terhadap langkah Pemerintah Daerah yang melakukan pemetaan objek pendapatan sebanyak dua kali dalam satu bulan, Fraksi PAN meminta agar langkah tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan administratif, tetapi harus dapat dibuktikan dengan **hasil yang terukur**, baik berupa bertambahnya basis data wajib pajak dan wajib retribusi, meningkatnya tingkat kepatuhan, berkurangnya potensi kebocoran, maupun meningkatnya realisasi PAD.

Pimpinan Rapat, Para Anggota Dewan, Bupati serta Hadirin wal hadirat yang berbahagia dan yang kami muliakan

Demikian pula terhadap penerapan QRIS, Virtual Account dan sistem digitalisasi lainnya, Fraksi PAN memberikan dukungan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pendapatan daerah. Namun, digitalisasi harus diposisikan sebagai **instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan optimalisasi PAD**, bukan sekadar pemenuhan administrasi teknologi.

Oleh karena itu, Fraksi PAN meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber-sumber PAD dan menyusun strategi peningkatan PAD berdasarkan **potensi riil, basis data yang valid, target yang realistis dan indikator keberhasilan yang terukur**.

Fraksi PAN juga meminta agar pada penyusunan dan pelaksanaan APBK tahun berikutnya, Pemerintah Daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi peningkatan PAD, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha secara berlebihan. Realisasi belanja daerah tidak hanya dinilai berdasarkan persentase penyerapan anggaran. Tingginya serapan anggaran belum tentu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Ukuran keberhasilan harus dilihat dari output dan outcome: apakah jalan yang dibangun benar-benar bermanfaat, apakah fasilitas kesehatan meningkatkan pelayanan, apakah pendidikan masyarakat semakin baik, dan apakah program pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Fraksi PAN meminta Pemerintah Daerah memperbaiki perencanaan belanja agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan berorientasi pada hasil.

Fraksi PAN meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memberikan perhatian lebih besar terhadap kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur harus berdasarkan skala prioritas dan tingkat kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan menghabiskan anggaran. Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan diperkuat agar pembangunan yang menggunakan uang rakyat dapat bertahan lama dan memberikan manfaat maksimal.

Fraksi PAN menilai sektor pendidikan harus tetap menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Pemerintah Daerah perlu memastikan anggaran pendidikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar meningkatkan akses, mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana sekolah serta hasil belajar peserta didik. Kami juga meminta perhatian terhadap sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil agar tidak terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.

Fraksi PAN meminta Pemerintah Daerah memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi harus berbasis data yang valid dan mutakhir, sehingga tidak terjadi salah sasaran. Kami juga mendorong pergeseran pendekatan dari sekadar bantuan konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian, peternakan, UMKM dan usaha produktif lainnya.

Dan Terakhir Fraksi PAN meminta seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara serius dan tepat waktu. Jangan sampai rekomendasi pemeriksaan hanya menjadi dokumen administratif tanpa penyelesaian yang konkret. Kami meminta Pemerintah Daerah memberikan perhatian terhadap aspek kepatuhan, pengendalian internal, pengelolaan aset, belanja dan penerimaan daerah, serta memastikan permasalahan yang sama tidak berulang pada tahun anggaran berikutnya.

Fraksi PAN tidak ingin keberhasilan pengelolaan keuangan daerah hanya diukur dari angka-angka dalam laporan, sementara di tengah masyarakat masih terdapat persoalan jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kemiskinan, kesempatan ekonomi serta kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, Fraksi PAN meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menjadikan seluruh catatan dan rekomendasi Fraksi ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBK pada masa yang akan datang.

TERHADAP KUA DAN PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027

Fraksi PAN memberikan apresiasi terhadap proses pembahasan KUA dan PPAS APBK Tahun Anggaran 2027 yang telah dilakukan bersama antara DPRK dan Pemerintah Daerah.

Namun demikian, Fraksi PAN memberikan beberapa catatan penting.

1. **penyusunan APBK 2027 harus berbasis pada kemampuan keuangan daerah dan potensi pendapatan yang realistis.** Pemerintah Daerah jangan menetapkan target pendapatan yang terlalu tinggi tanpa didukung basis data dan strategi pencapaian yang jelas.
2. Fraksi PAN meminta agar anggaran tahun 2027 benar-benar diarahkan pada **program prioritas dan kebutuhan dasar masyarakat**, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Fraksi PAN meminta agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan **kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
4. Fraksi PAN mengingatkan Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap belanja daerah sehingga tidak terjadi pemborosan, kegiatan yang tumpang tindih, maupun pengalokasian anggaran yang manfaatnya kurang dirasakan masyarakat.
5. Setiap program yang dituangkan dalam APBK 2027 harus memiliki **indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.** Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat.

Atas dasar itu, Fraksi PAN menegaskan bahwa **APBK 2027 harus menjadi APBK yang lebih produktif, tepat sasaran, transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.**

TERHADAP KUA DAN PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

Terhadap Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026, Fraksi PAN memahami bahwa perubahan anggaran merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah dan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi keuangan serta kebutuhan pembangunan.

Namun, Fraksi PAN meminta agar setiap perubahan anggaran memiliki **alasan yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.**

Perubahan APBK jangan sampai hanya menjadi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran tanpa mempertimbangkan urgensi dan manfaat bagi masyarakat.

Fraksi PAN meminta Pemerintah Daerah memastikan bahwa program yang ditambahkan maupun dikurangi benar-benar berdasarkan **prioritas dan kebutuhan yang mendesak**, serta tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Fraksi PAN juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa setelah perubahan APBK ditetapkan, seluruh SKPK mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan prinsip **efisiensi, kualitas pekerjaan, transparansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Fraksi PAN tidak menginginkan adanya percepatan belanja pada akhir tahun yang kemudian berdampak pada rendahnya kualitas pekerjaan.

TERHADAP PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024–2029

Fraksi PAN memandang perubahan Tata Tertib DPRK merupakan bagian penting dalam memperkuat kelembagaan DPRK dalam menjalankan fungsi **legislasi, anggaran dan pengawasan.**

Tata tertib harus mampu menciptakan mekanisme kerja DPRK yang lebih efektif, tertib, transparan dan bertanggung jawab.

Fraksi PAN menekankan bahwa perubahan Tata Tertib hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek administratif internal lembaga, tetapi juga harus memperkuat **fungsi representasi DPRK terhadap kepentingan masyarakat.**

DPRK harus menjadi lembaga yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat, mampu melakukan pengawasan secara objektif dan mampu menjalankan fungsi legislasi secara berkualitas.

Fraksi PAN juga berharap perubahan Tata Tertib dapat memperjelas mekanisme kerja alat kelengkapan DPRK, rapat-rapat DPRK, pembahasan anggaran, pengawasan terhadap pemerintah daerah serta penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, Tata Tertib bukan sekadar aturan internal, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan **kualitas kinerja dan marwah DPRK Aceh Tenggara**.

TERHADAP PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024–2029

Fraksi PAN memahami bahwa perubahan komposisi Alat Kelengkapan DPRK merupakan bagian dari dinamika kelembagaan dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku.

Fraksi PAN menegaskan bahwa perubahan komposisi Alat Kelengkapan DPRK harus diarahkan untuk **meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja lembaga**, bukan semata-mata sebagai pembagian posisi politik.

Rapat Dewan Dewan Yang kami hormati

Setelah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, **Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan Dapat Menerima dan Menyetujui**

1. **Rancangan Qanun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 Untuk Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh**
2. **Rancangan Kesepakatan KUA dan PPAS ABPK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2027 Menjadi KUA dan PPAS Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2027**
3. **Rancangan Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 Menjadi KUA dan PPAS Perubahan ABPK Aceh Tenggara Tahun 2026**
4. **Usulan Perubahan Tata Tertib DPRK Aceh Tenggara Masa Jabatan 2024-2029 Menjadi Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tenggara Tahun 2024 - 2029**
5. **Usulan Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRK Aceh Tenggara Masa Jabatan 2024 – 2029 Menjadi alat Kelengkapan DPRK Aceh Tenggara Tahun 2024-2029**

dengan sejumlah catatan, rekomendasi dan komitmen perbaikan sebagaimana telah kami sampaikan.

Persetujuan ini merupakan bentuk tanggung jawab politik Fraksi PAN terhadap keberlanjutan pemerintahan daerah, namun sekaligus menjadi penegasan bahwa **setiap penggunaan APBK harus semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, berorientasi pada hasil dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Aceh Tenggara**.

Pimpinan Rapat, Anggota Dewan, Saudara Bupati, Kepala instansi dan Organisasi Perangkat Daerah serta Hadirin yang berbahagia

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi ini kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah SWT, semoga kita diberikan kesabaran jiwa dan keteguhan hati untuk tetap berpijak pada kepentingan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Wabillahaufikwalhidayah Wassaalamu’alaikum Wr. Wb.

KUTACANE, 28 AGUSTUS 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
FRAKSI PARTAI PAN

NO	NAMA	JABATA	TANDA TANGAN
1	ANUGRAH RIZKY PUTRA, ST	KETUA	1Dto.....
2	H.MARWAN HUSNI, S.Sos.I	WAKIL KETUA	2Dto.....
3	SAHIDIN BASRI	SEKRETARIS	3Dto.....
4	MARSIDIN SITEPU	ANGGOTA	4Dto.....
5	GERLAM	ANGGOTA	5Dto.....
6	GEGOH MUSTAWA MADYA	ANGGOTA	6Dto.....

TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI PAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA. UNTUK KESEMPATAN YANG KEDUA --- KAMI PERSILAKAN KEPADA FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA. -----

II. PANDANGAN UMU HANURA PERJUANGAN BANGSA :

ASSLAMU’ALAIKUM W.W
SALAM SEJAHTERA BAGI SEMUA

- **YANG TERHORMAT** SAUDARA KETUA SEBAGAI PIMPINAN SIDANG, DAN
- **YANG TERHORMAT** WAKIL KETUA SERTA SELURUH ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- **YANG TERHORMAT** SAUDARA **BUPATI DAN WAKIL BUPATI** ACEH TENGGARA
- **YANG SAYA HORMATI** PARA ASISTEN, PARA STAF AHLI BUPATI, KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN/ KEPALA KANTOR DAN PARA CAMAT SE KABUPATEN ACEH TENGGARA.

➤ **SERTA YANG KAMI MULIAKAN** PARA HADIRIN, HADIRAT DAN TAMU UNDANGAN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KITA HATUR KEPADA **TUHAN YANG MAHA ESA**, YANG MANA ATAS RAHMAT NYA PADA SIANG YANG SANGAT BERBAHAGIA INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA SIDANG KE - III (TIGA) TAHUN 2026 DENGAN AGENDA RAPAT PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI TERKAIT DENGAN RANCANGAN QANUN **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025**. DAN LAINNYA SEBAGAI MANA KAMI SAMPAIKAN DI ATAS.

SEBELUM KAMI MELANJUTKAN PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI FRAKSI INI, IZINKAN KAMI MENGUCAPKANKAN :

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PIMPINAN RAPAT, ATAS KESEMPATAN YANG DI BERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA INI,

UCAPAN TERIMA KASIH, JUGA KAMI HATURKAN KEPADA SAUDARA BUPATI DALAM HAL INI DIWAKILKAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH ACEH TENGGARA YANG TELAH MENJAWAB SEMUA REKOMENDASI DEWAN MELALUI PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI YANG ADA, SEMOGA SETIAP JAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERSEBUT MENJADI BUKTI YANG NYATA BAGI KEPENTINGAN KHALAYAK BAYAK KHUSUSNYA MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.

**SAUDARA KETUA WAKIL KETUA
SAUDARA SEKDA
DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN**

KITA SAMA-SAMA MEMAHAMI BAHWA PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBK TAHUN ANGGARAN 2025 MERUPAKAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL YANG HARUS KITA LAKUKAN BERSAMA-SAMA PADA SETIAP TAHUNNYA GUNA UNTUK MENGEVALUASI SEJAUH MANA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN YANG TELAH KITA SEPAKATI SEBAGAI MANA TERTUANG DI DALAM APBK TAHUN ANGGARAN 2025.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK 2025 MERUPAKAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH YANG BERSIFAT KEWAJIBAN SEKLIUGUS MENJADI BENTUK PENGEMBANGAN PRAN DAN FUNGSI DPRK SEBAGAI MITRA KERJA PEMERINTAH DAERAH GUNA MENINGKATKAN EFESIENSI, AKUNTABILITAS DAN MENJADI FUNGSI KONTROL LEGESLASI YANG BERSIFAT MEMBANGUN

SEHUBUNGAN TELAH DI JAWABNYA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI, MAKA FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA MELAKUKAN PENGKAJIAN SECARA SEKSAMA DI INTERNAL FRAKSI DENGAN MENGHASILKAN CATATAN REKOMENDASI UNTUK DI INGAATKAN KEMBALI SEBGAI BERIKUT.

1. FRAKSI HANURA PERJUNGAN BANGSA MEMINTA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA UNTUK MEMPERIORITASKAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN TEPAT WAKTU PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN LANGKAH INI SANGAT PENTING GUNA UNTUK MENCEGAH AKUMULASI TUNDA BAYAR YANG SEMAKIN MENUMPUK SEHINGGA DAPAT MEMPENGARUHI BEBAN FISKAL YANG SEMAKIN MEMBESAR PASTINYA INI SANGAT MENGGANGGU STABILITAS APBK DI TAHUN YANG AKAN DATANG.
2. FRAKSI HANURA MELIHAT ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA MERUPAKAN WUJUD KINERJA KEUANGAN DAERAH YANG AKAN DI UMUMKAN DALAM PROGRAM KEGIATAN FISIK, KEBERHASILAN ITU TIDAK HANYA DI CAPAIAN TARGET DAN REALISASI ANGGARANNYA SEMATA TETAPI HARUS DI LIHAT SEJAK PROSES PERENCANAAN PELAKSANAAN SEBAB SANGAT DAN SANGAT MUSTAHIL REALISASI PEMBANGUNAN YANG TEPAT SASARAN DAPAT TERWUJUD APABILA TAMPA ADA PERENCANAAN YANG BEGITU MATANG.
3. KAMI FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA JUGA MEMENDANG PERLU PEMERINTAH DAERAH HARUS LEBIH FOKUS DAN LEBIH FOKUS LAGI DALAM HAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN BIDANG PEMBANGUNAN INVESTASI DAN PERMODALAN YANG SELARAS ATAU SESUAI BAGI **UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH)** AGAR DAPAT LEBIH MAJU DARI WAKTU KE WAKTU
4. KAMI JUGA MENDORONG PEMERANTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA UNTUK TERUS DAPAT BERKOORDINASI DENGAN PIHAK KEMENTERIAN SOSIAL INDONESIA TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA YANG SAAT INI BETUL-BETUL SANGAT MEMPRIHATINKAN MENINGAT HAK YANG SEMESTINYA DI TERIMA MASIH JAUH DARI HARAPANNYA, INI MENJADI TUGAS YANG TIDAK MUDAH DAN KAMI SANGAT BERHARAP AGAR PEMERINTAH DAERAH MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT.
5. UNTUK MENUJU ACEH TENGGARA YANG HEBAT DAN BERMARTABAT DI MASA YANG AKAN DATANG PASTINYA HARUS ADA KOORDINASI YANG BAIK DI SETIAP STACKHOLDER YANG ADA DAN KAMI BERPENDAPAT BAHWA PIHAK EKSEKUTIF KIRANYA TERUS MEMBUAT PROGRAM YANG MEMBANGUN GENERASI EMAS, DENGAN MENJALANKAN VISI DAN MISINYA YANG TELAH TERTUANG DI RPJMK (RENCANA PRGRAM JANGKA MENENGAH KABUPATEN) UNTUK PERIODE 2025-2030

AKHIRNYA SETELAH MENGAMATI, MENKAJI, DAN MELAKUKAN DISKUSI SERTA MUYAWARAH YANG BEGITU ALOT DI INERNAL FRAKSI KAMI, MAKA KAMI FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MENYATAKAN SIKAP KAMI YAITU

= DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI =

1. RANCANGAN QANUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025.
2. NOTA KESEPAKATN KUAPPAS APBK ACEH TENGGARA T.A 2027
3. NOTA KESEPAKATAN KUAPPAS P APBK ACEH TENGGARA T.A 2026,
4. PERUBAHAN TATIB DPRK ACEH TENGGARA PERIODE 2024-2029
5. KOMPOSISI AKD PERWAKILAN RAKYAT PERIODE TAHUN 2024-2029

DENGAN MEMPERHATIKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR ACEH NANTINYA.

DEMIKIANLAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA INI KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA KITA SEMUA DAPAT MENUNJUKAN WUJUD RASA CINTA KITA TERHADAP NEGERI YANG METUAH YANG SAMA-SAMA KITA CINTAI INI .

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN MOHON MAAF KAMI ATAS SEMUA KETIDAK PATUTAN DAN KETIDAK SESUAIAN YANG KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA TETAP MEMBERIKAN PETUNJUK JALAN LURUS TERHADAP KITA SEMUA DALAM MEMBANGUN ACEH TENGGARA YANG SAMA-SAMA KITA CINTAI INI.

AMINNN..

KUTACANE, 28 AGUSTUS 2026
FRAKSI HANURA PEJUANGAN BANGSA
DPRK ACEH TENGGARA

NO	NAMA	JABATA	TANDA TANGAN
1	ROY HENDRA PURNOMO, SE	KETUA	1dto.....
2	M. MUFTY DESKY	WAKIL KETUA	2dto.....
3	TIMBUL HASUDUNGAN	SEKRETARIS	3dto.....
4	MUSYADI, SPd	ANGGOTA	4dto.....
5	MANUMPAK	ANGGOTA	5dto.....
6	MUHARI KASTURI	ANGGOTA	6dto.....
7	H. BUKHARI	ANGGOTA	7dto.....

TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI HANURA PERJUANGAN BANGSA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA --- UNTUK SELANJUTNYA KEPADA FRAKSI SELAYAKH --- KAMI PERSILAKAN. -----

III. PENDAPAT AKHIR FRAKSI SELAYAKH :

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR ATAS KEHADIRAD ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA TUHAN YANG MAHA ESA, BERKAT LIMPAHAN RAHMAT SERTA NIKMATNYA, SEHINGGA KITA SEMUA MASIH DAPAT BERKUMPUL DI TEMPAT YANG MULIA INI DALAM KEADAAN SEHAT DAN SEJAHTERA.

YANG SEAKIDAH DENGAN KAMI MARILAH SENANTIASA KITA BERSHALAWAT KEPADA JUNJUNGAN ALAM YAKNI NABI BESAR MUHAMMAD SAW, KARENA BELIAULAH KITA DAPAT MENGENAL MANA YANG BENAR DAN MANA YANG SALAH.

- ❖ YTH. SAUDARA KETUA , PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
- ❖ YSH.SAUDARA SEKDA KABUPATEN ACEH TENGGARA
- ❖ YSH.PARA UNSUR FORKOMPIMDA KABUPATEN ACEH TENGGARA
- ❖ YSH. SAUDARA SEKDA, PARA ASISTEN / STAF AHLI / KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
- ❖ YSH. PARA UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

MENGAWALI PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR INI, IZINKAN KAMI DARI FRAKSI SELAYAKH MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMAKASIH :

YANG PERTAMA KEPADA PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRK KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG BERKENAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI SELAYAKH TENTANG : **RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027, DAN NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA T.A. 2026,**

PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024 2029 DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN TAHUN 2024 2029.

RAPAT PARIPURNA DPRK YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SETELAH KAMI MENDENGAR DAN MENCERMATI ATAS JAWABAN DAN PENJELASAN BUPATI ACEH TENGGARA **RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027, DAN NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA T.A. 2026, PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024 2029 DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN TAHUN 2024 2029.**

TERIMA KSIH ATAS JAWABAN SAUDARA BUPATI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH NAMUN KAMI JUGA TEGASKAN DISINI DALAM PENGELOLAAN ATAUPUN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH INI JANGAN TIDAK SERIUS KARENA PENDAPATAN ASLI DAERAH JUGA ADALAH SALAH SATU PENDUKUNG BERJALANNYA RODA PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA INI. SEBAGAIMANA YANG KITA RASAKAN PADA SAAT INI.

KAMI FRAKSI SELAYAKH MENGAPRESIASI ATAS JAWABAN SAUDARA BUPATI DALAM HAL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LEGISLATIF KEPADA EKSEKUTIF, INI JUGA KAMI LAKUKAN SESUAI DENGAN TUPOKSI ANGGOTA DEWAN SEBAGAI PENGAWASAN, UNTUK MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN.

TERIMA KSIH ATAS JAWABAN SAUDARA BUPATI DALAM MENANGGAPI RENDAHNYA KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH UNTUK PENGELOLAAN APBK TAHUN 2025 DIKARENAKAN DAMPAK DARI PEMOTONGAN TKD DARI PEMERINTAH PUSAT,

NAMUN YANG INGIN KAMI SAMPAIKAN ADALAH PENGELOLAAN DANA APBK 2025 YANG ADA BUKAN YANG TIDAK ADA, KALAU YANG DIPOTONG MEMANG UANGNYA TIDAK ADA LAGI, INI UANG YANG ADA SAJA TIDAK MENENTU PERUNTUKANNYA.

TERIMA KSIH ATAS JAWABAN SAUDARA BUPATI TENTANG EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN ACEH TENGGARA YANG BELUM MAKSIMAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN AIR MINUM KEPADA MASYARAKAT, DAN MEMBERIKAN PERINTAH KEPADA INSPEKTORAT UNTUK PENDAMPINGAN MANAJEMEN PENEGLOLAAN AIR MINUM, TAPI DISIN PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA JANGAN DI DAMPINGI SAJA AKAN TETAPI HARUS DIBINA TERUS KALAU TIDAK BISA DIBINA DIBINASAKAN SAJA.

KAMI JUGA FRAKSI SELAYAKH MENGAPRESIASI ATAS JAWABAN SAUDARA BUPATI TENTANG TELAH DIGANTINYA KEPALA BAGIAN EKONOMI SETDAKAB DAN KAMI HARAPKAN KINERJA KEPALA BARU INI DAPAT BEKERJA DENGAN MAKSIMAL DAN DAPAT MENJALANKAN TUGAS DAN TUPOKSI UNTUK MASYARAKAT.

UCAPAN TERIKASIH KAMI FRAKSI SELAYAKH KEPADA SAUDARA BUPATI ATAS JAWABAN TENTANG DBH SAWIT DAN PERUNTUKANNYA NAMUN KAMI MASIH MELIHAT ADA SISA DBH SAWIT DI TAHUN 2025 Rp. 8.049.661.700,- (DELAPAN MILYAR EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS RUPIAH) INI HASIL DARI REKONSILIASI DJPK, KAMI INGIN TEGASKAN DISINI TENTANG SISA DANA TERSEBUT, JIKALAU NANTINYA TIDAK ADA ARAH YANG JELAS DARI PERUNTUKAN DANA TERSEBUT MAKA KAMI AKAN LAKUKAN KETEGASAN DALAM PENGAWASANNYA.

KAMI FRAKSI SELAYAKH MENGAPRESIASI ATAS JAWABAN SAUDARA BUPATI BERSEPAKAT UNTUK PEMBANGUNAN POS BANTU PENGADUAN MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN KECAMATAN LEUSER DAN KECAMATAN LAU BALENG TANAH KARO, INI ADALAH MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK KEHADIRAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MASYARAKAT YANG JAUH DARI JANGKAUAN KOTA. SEMOGA CEPAT TERBANGUNNYA DAN TEREALISASINYA.

TERIMA KSIH ATAS JAWABAN SAUDARA BUPATI BERSEPAKAT UNTUK PENYUSUNAN QANUN TENTANG LAHAN PERTANIAN DAN MEMEBRIKAN PERINTAH KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN UNTUK SEGERA MENYUSUN KAJIAN LAHAN PERTANIAN YANG MASIH PRODUKTIF. DAN KAMI HARAPKAN DALAM HAL INI UNTUK DIPERCEPAT PENGKAJIANNYA.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA....

SEBAGAI KESIMPULAN DARI FRAKSI SELAYAKH ADALAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA HARUS LEBIH MEMAKSIMALKAN LAGI DALAM UPAYA PENINGKATAN SDM DAN KAPASITAS SERTA KUALITAS UNTUK SEMUA SEKTOR DENGAN TUJUAN MENJADIKAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MENJADI MASYARAKAT YANG BERKOPETEN DAN SEJAHTERA.

ACEH TENGGARA, 28 AGUSTUS 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
FRAKSI SELAYAKH

NO	NAMA	JABATA	TANDA TANGAN
1	M. RAFI SEKEDANG	KETUA	1dto.....
2	ALIYAS	WAKIL KETUA	2dto.....
3	SATRIA ABADI	SEKRETARIS	3dto.....
4	RONAL HOLOMAN	ANGGOTA	4dto.....

TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI SELAYAKH YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA ---
UNTUK KESEMPATAN YANG TERAKHIR --- KAMI PERSILAKAN KEPADA FRAKSI GOLKAR. -----

IV. PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR :

SELAMAT SORE
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

- YANG TERHORMAT SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRK ACEH TENGGARA
- YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA
- YANG KAMI HORMATI, PARA ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR DAN PARA CAMAT SE ACEH TENGGARA.
- YANG KAMI HORMATI PARA TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, ORGANISASI POLITIK, PROFESI, PEMUDA, UNSUR PERS, SERTA
- REKAN-REKAN LSM DAN SELURUH HADIRIN DAN HADIRAT YANG BERBAHAGIA.
- PARA HADIRIN TAMU DAN UNDANGAN SEKALIAN YANG KAMI MULIAKAN

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI DENGAN BERSERAH DIRI DAN RASA IKHLAS YANG TULUS MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KITA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS BERKAT DAN RAHMAT-NYA PADA HARI INI KITA SEMUA MASIH DIBERI KESEHATAN DAN PIKIRAN YANG JERNIH UNTUK BERSAMA-SAMA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA SIDANG III TAHUN 2026 TENTANG **RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027, NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN 2026, PERUBAHAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024 – 2029 DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029.**

SAUDARA PIMPINAN, SAUDARA SEKDA, ANGGOTA DEWAN SERTA PARAHADIRIN YANG KAMI HORMATI

SEBELUM KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI INI IZINKAN KAMI MENGAJAK SELURUH HADIRIN YANG IKUT HADIR UNTUK MENGENANG JASA PARA PAHLAWAN KITA DALAM MEMPERINGATI HUT RI KE-80 DENGAN PENUH SEMANGAT KEMERDEKAAN, MARI TERUS KOBARKAN SEMANGAT JUANG PAHLAWAN DALAM DIRI KITA JADILAH GENERASI YANG TIDAK HANYA MENGENANG KEMERDEKAAN TETAPI JUGA MENJAGA DAN MENGISINYA DENGAN KARYA INOVASI DAN PRESTASI MELANJUTKAN TONGKAT ESTAPET PERJUANGAN DENGAN AKSI YANG NYATA DENGAN MENJAGA TANAH AIR KITA, BUMI SEPAKAT SEGENEP INI DENGAN ILMU, CINTA, DAN KONTRIBUSI YANG NYATA DEMI KEMAJUAN GENERASI PENERUS KITA, KEMAJUAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA DAN KEMAJUAN NEGERI ALAS METUAH KABUPATEN ACEH TENGGARA... MARI BANGKIT BERSATU MERDEKAAA...!!!

SETELAH MEMBACA DAN MENCERMATI RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, RANCANGAN KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027, RANCANGAN KESEPAKATAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN 2026, PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024 – 2029 DAN USULAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

SERTA JAWABAN BUPATI YANG DIBACAKAN OLEH SEKDA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI, MAKA IZINKAN KAMI DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI, ADAPUN SARAN DAN KRITIKAN TIDAK LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK PERBAIKAN DAN KEMAJUAN ACEH TENGGARA DI MASA MENDATANG.

SAUDARA PIMPINAN, SAUDARA SEKDA, DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT

PENYAMPAIAN LAPORAN RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025. NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027 DAN NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 INI MEMILIKI ARTI YANG SANGAT PENTING DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TENGGARA, DAN DAPAT DI JADIKAN SEBAGAI BAHAN KOREKSI DAN EVALUASI BAGI PIHAK EKSEKUTIF UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN, PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEDEPANNYA, UNTUK MENJADI YANG LEBIH BAIK LAGI, DEMI TERSAJINYA LAPORAN YANG TERANSPARANSI DAN DAPAT DI PERTANGGUNG

JAWABKAN SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.

SEIRING DENGAN JAWABAN DARI PEMERINTAH DAERAH YANG DIBACAKAN OLEH SEKDA ATAS USULAN KAMI DARI FRAKSI GOLKAR TENTANG INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN JALAN DESA MERANTI – LUMBAN TUA KECAMATAN BABUL RAHMAH YANG SUDAH DITUNGGU DALAM KURUN WAKTU 12 TAHUN SAMPAI SAAT INI, TIDAK MENEGASKAN AKAN MELAKUKAN Pengerjaannya segera, jawabannya masih kendala “TERKENDALA” TIDAK SIGNIFIKAN DI JELASKAN URGENSINYA APA ?. SEBAB KEGIATAN PENGASPALAN INI SUDAH ADA ALOKASI ANGGARAN DARI DBH SAWIT SEBESAR KURANG LEBIH 4,7 M DAN SUDAH ADA DALAM KONTRAK DAN LELANG. HARAPAN KAMI DAN PERLU DIPERTEGAS SERTA MEMOHON SEBESAR – BESARNYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH MELALUI PAK SEKDA AGAR KEGIATAN INI DIREALISASIKAN TAHUN INI DAN KAMI AKAN PANTAU TERUS KEGIATAN INI SAMPAI TITIK DARAH PENGHABISAN DAN NAPAS MASIH DIKANDUNG BADAN. PERLU DI INGAT PERJUANGAN INI SUNGGUH SUNGGUH SANGAT LEHAH NAMUN TIDAK AKAN LUNTUR MENYAMPAIKAN DAN MEMOHON, MEMINTA KEPADA PEMERINTAH AGAR DIBERI KEARIFAN DAN KEBIJAKAN DALAM MERESTUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEPerti HARAPAN DAN DO'A MASYARAKAT BABUL RAHMAH !.

KAMI DARI FRAKSI GOLKAR TENTUNYA BERHARAP DENGAN TERBENTUKNYA RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025. NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027 DAN NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026, KITA MELAKUKAN SUATU DORONGAN, SERTA PENGUATAN, DAN PENINGKATAN DI SEMUA SEKTOR KEHIDUPAN, BAIK SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERTANIAN, PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA SEKTOR LAINNYA TERMASUK DI DALAMNYA MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG ADA.

SEPerti KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA KUA DAN PPAS ADALAH DOKUMEN PERENCANAAN KEUANGAN TAHUNAN YANG DISUSUN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRK SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN APBK. MEMUAT TARGET PENDAPATAN, PERKIRAAN BELANJA, KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN ASUMSI MAKRO EKONOMI. DAN INI JUGA MENJADI ACUAN PENYUSUNAN RKA BAGI PERANGKAT DAERAH. KAMI DARI FRAKSI GOLKAR MENYADARI KETERBATASAN ANGGARAN YANG TERSEDIA DAN MINIMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH MENGHARUSKAN KITA LEBIH JELI DALAM MERINCI PROGRAM PRIORITAS. SALAH SATU YANG MENJADI PRIORITAS ITU ADALAH PERBAIKAN IRIGASI LAWE BULAN DI DESA KUTA TINGGI, KARENA SAAT INI RATUSAN HEKTAR SAWAH DIKECAMATAN BABUSSALAM TERANCAM GAGAL TANAM.

BERKAITAN RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027 DAN NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 YANG SEBENTAR LAGI KITA SEPAKATI BERSAMA, HENDAKNYA DALAM PELAKSANAANYA MENJADI PERHATIAN YANG SERIUS OLEH PEMERINTAH DAERAH, DENGAN TUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN VISI MISI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM **MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, HARMONIS DAN BERKELANJUTAN DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT.**

SAUDARA PIMPINAN, SAUDARA SEKDA DAN ANGGOTA DEWAN SERTA PARA HADIRIN YANG TERHORMAT APA YANG KAMI SAMPAIKAN DIATAS ADALAH BENTUK KOMITMEN KAMI DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP KECINTAAN DAN KOMITMEN KITA BERSAMA DEMI KEMAJUAN ACEH TENGGARA, DENGAN INI MENYATAKAN :

- 1. FRAKSI PARTAI GOLKAR MENSETUJUI RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, MENJADI QANUN ACEH TENGGARA TAHUN 2026,**
- 2. MENSETUJUI RANCANGAN KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027 MENJADI KUA DAN PPAS TAHUN 2027,**
- 3. MENSETUJUI RANCANGAN KESEPAKATAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN 2026,**
- 4. MENSETUJUI RANCANGAN PERUBAHAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024 – 2029 MENJADI PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024 – 2029 DAN**
- 5. MENSETUJUI USULAN PERUBAHAN ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024 – 2029 MENJADI ALAT KELENGKAPAN DEWAN MASA JABATAN 2024 - 2029**

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA SEKDA DAN ANGGOTA DEWAN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULIAKAN....

DEMIKIAN KAMI SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, RANCANGAN KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2027, RANCANGAN KESEPAKATAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN 2026, PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024 – 2029 DAN USULAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

**SEKIAN DAN TERIMAKASIH
WASSALAM**

**KUTACANE, 28 AGUSTUS 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
FRAKSI PARTAI GOLKAR**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ARNOLD, SH	Ketua	dto.....
2	MIRZA AL MAHBUBI, ST, MT	Wakil Ketua	dto.....
3	PUTRI NIKEN JILE, Bbs	Anggota	dto.....
4	Dr. DENNY FEBRIAN ROZA, M.Si	Anggota	dto.....
5	DIAN REZA PAHLEVI, SH	Anggota	dto.....
6	SAMSUARIADI, ST, M.,Si	Anggota	dto.....
7	MARAWAL HAKIM	Anggota	dto.....
8	MUSLIADI	Anggota	dto.....
9	INTAN PERMATASARI	Anggota	dto.....
10	ABI HASAN, SH	Anggota	dto.....
11	KAMIRUN MUNTHE	Anggota	dto.....
12	MARUAN HANAFI	Anggota	dto.....
13	BUSTAMI RAMUD	Anggota	dto.....

HADIRIN PESERTA SIDANG YANG KAMI HORMATI

TERIMA KASIH KEPADA SEMUA FRAKSI YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA --- MAKA UNTUK SELANJUTNYA KITA MEMASUKI KE ACARA BERIKUTNYA DENGAN AGENDA --- PEMBACAAN PERSETUJUAN BERSAMA FRAKSI-FRAKSI --- KEPADA FRAKSI YANG MEWAKILI KAMI PERSILAKAN DENGAN SEGALA HORMAT. (PERSETUJUAN BERSAMA FRAKSI-FRAKSI TERLAMPIR). -----

DENGAN TELAH DIBACAKANNYA PERSETUJUAN BERSAMA FRAKSI-FRAKSI TADI --- MAKA AGENDA KITA SELANJUTNYA --- PEMBACAAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI ACEH TENGGARA DENGAN DPRK ACEH TENGGARA TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, NOTA KESEPAKATAN RANCANGAN KUA-PPA APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027, NOTA KESEPAKATAN RANCANGAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026, PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029 DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029 --- KEPADA SAUDARA SEKWAN KAMI PERSILAKAN. -----

HADIRIN PESERTA SIDANG YANG KAMI HORMATI

INI KAMI TANYAKAN KEPADA SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, APAKAH KONSEP PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI DENGAN DPRK ACEH TENGGARA INI DAPAT KITA SETUJUI? (- **PESERTA RAPAT : MENYATAKAN SETUJU** -) MAKA PIMPINAN RAPAT MENGETUK PALU 1X BAHWAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA TELAH DISAHKAN MENJADI PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DENGAN DPRK ACEH TENGGARA. -

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI --- BAHWA KONSEP PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI ACEH TENGGARA DENGAN DPRK ACEH TENGGARA TELAH DI SETUJUI --- MAKA UNTUK SELANJUTNYA --- KITA MASUK KE AGENDA YANG TERAKHIR YAITU :

1. PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025;
2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKAN RANCANGAN KUA-PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027;
3. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN RANCANGAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGAA TAHUN ANGGARAN 2026.
4. PENANDATANGAN PERATURAN DPRK ACEH TENGGARA TENTANG TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029;
5. PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029

KEPADA SAUDARA SEKDA DAN PIMPINAN DPRK --- DIPERSILAKAN MENUJU MEJA YANG TELAH DI SEDIAKAN. (BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN TERLAMPIR) -----

HADIRIN PESERTA SIDANG YANG KAMI HORMATI

DENGAN TELAH DISERAHKANNYA PERSETUJUAN BERSAMA TADI KEPADA SAUDARA BUPATI --- MAKA BERAKHIRLAH RAPAT PARIPURNA KITA PADA HARI INI :

AKHIRNYA, DENGAN MENGUCAPKAN **ALHAMDULILLAHIRABBIL 'ALAMIN**, RAPAT PARIPURNA DPRK ACEH TENGGARA MASA SIDANG III TAHUN 2026 TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNJAWABAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025, NOTA KESEPAKATAN RANCANGAN KUA-PPAS APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027, NOTA KESEPAKATAN RANCANGAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBK ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026,PERUBAHAN TATA TERTIB DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029, DAN PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2024-2029 -- KAMI **SKOR** MAKA RAPAT PARIPURNA INI AKAN KITA LANJUTKAN --- SAMPAI HASIL EVALUASI DARI GUBERNUR ACEH SELESAI.

RAPAT KAMI SKOR

TOK.... (SATU KALI KETUKAN)

*SEKIAN DAN TERIMA KASIH !!!
KAMI AKHIRI. !!!*

**BILLAH TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB**

KUTACANE, 28 AGUSTUS 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA
KETUA,



Dr. DENNY FEBRIAN ROZA, S.STP, M.Si